PADANG PARIAMAN

SAIYO SAKATO

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2018

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2018 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun 2018. Dokumen ini juga memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang berisi target dan realisasi dalam membelanjakan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggraraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 29 Maret 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Parit Malintang, 29 Maret 2019

Mengetahui/Menyetujui:
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
INSPEKTORAT

SYAFRIWAL SE. MM
Pembina Utama Muda NIP. 19621014 198811 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 18 (delapan belas) sasaran strategis yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 17 (tujuh belas) indikator dikategorikan sangat berhasil, 3 (tiga) indikator dikategorikan berhasil. Meskipun demikian capain untuk tahun berikutnya perlu perhatian untuk ditingkatkan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Ihtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
Daftar Matrik ix
Daftar Grafik x
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum 2
1. Kondisi Geografis 2
2. Demografis 4
3. Produk Domestik Regional Bruto 4
4. Pertumbuhan Ekonomi 6
C. Struktur Organisasi 8
D. Sumber Daya Aparatur 9
E. Isu Strategis dan Permasalah Pembangunan 10
F. Sistematika Penulisan 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
A. Visi dan Misi 15
1. Visi 15
2. Misi 16
3. Tujuan dan Sasaran 16
B. Strategi dan Arah Kebijakan 18
C. Indikator Kinerja Utama 26
D. Perjanjian Kinerja 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
A. Pengukuran Kinerja 31
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama 32
C. Akuntabilitas Keuangan 113
BAB IV PENUTUP 119
A. Kesimpulan 119
B. Rencana Perbaikan Kedepan 119
Lampiran

Daftar Lampiran

1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Padang Pariaman
2. Perjanjian Kinerja Padang Pariaman Tahun 2018
3. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 – 2018	.....	4
Tabel 1.2	:	Jumlah Pegawai Negeri sipil Berdasarkan data SIMPEG Tahun 2018	.....	9
Tabel 2.1	:	Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 – 2021	.....	17
Tabel 2.2	:	Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 – 2021	.....	19
Tabel 2.3	:	Indikator Kinerja Utama	.....	26
Tabel 2.4	:	Perjanjian kinerja Tahun 2018 Kabupaten Padang Pariaman	.....	28
Tabel 3.1	:	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penaggung Jawab	.....	30
Tabel 3.2	:	Pengukuran dengan Skala ordinal	.....	32
Tabel 3.3	:	Capaian kinerja misi 1	.....	32
Tabel 3.4	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 1	.....	33
Tabel 3.5	:	Capain Kinerja misi 2	.....	34
Tabel 3.6	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 2	.....	35
Tabel 3.7	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 3	.....	42
Tabel 3.8	:	Capaian kinerja misi 3	.....	45
Tabel 3.9	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 4	.....	46
Tabel 3.10	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 5	.....	48
Tabel 3.11	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 6	.....	50
Tabel 3.12	:	Capaian Kinerja misi 4	.....	55
Tabel 3.13	:	Capaian indikator kinerja utama sasaran startegis 7	.....	56
Tabel 3.14	:	Nama kelompok sadar wisata berdasarkan lokasi wisata	.....	60
Tabel 3.15	:	Capaian indikator kinerja utama pada Sasaran strategis 8	.....	61
Tabel 3.16	:	Capain indikator Kinerja sasaran strategis 9	.....	64
Tabel 3.17	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 10	.....	65
Tabel 3.18	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 11	.....	68
Tabel 3.19	:	Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis 12	.....	70
Tabel 3.20	:	Capaian kinerja misi 5	.....	72
Tabel 3.21	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 13	.....	73

Tabel 3.22	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 14	.....	80
Tabel 3.23	:	Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2018	.....	81
Tabel 3.24	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 15	.....	83
Tabel 3.25	:	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi persektor lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman	.....	84
Tabel 3.26	:	Capaian kinerja misi 6	.....	93
Tabel 3.27	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	.....	94
Tabel 3.28	:	Skor hasil opini BPK	.....	94
Tabel 3.29	:	Program dan Kegiatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	.....	95
Tabel 3.30	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	.....	98
Tabel 3.31	:	Aspek Evaluasi SAKIP	.....	98
Tabel 3.32	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 16	.....	102
Tabel 3.33	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 17	.....	104
Tabel 3.34	:	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan OPD	.....	105
Tabel 3.35	:	Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2017 – 2018	.....	105
Tabel 3.36	:	Nilai mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB	.....	106
Tabel 3.37	:	Capaian kinerja Misi 7	.....	107
Tabel 3.38	:	Anggaran Pendapatan dan belanja TA 2018	.....	113
Tabel 3.39	:	Target dan Realisasi pendapatan daerah tahun 2018	.....	113
Tabel 3.40	:	Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018	.....	114
Tabel 3.41	:	Target dan realisasi pendapatan Transfer TA 2018	.....	114
Tabel 3.42	:	Target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2018	.....	115
Tabel 3.43	:	Pencapaian Kinerja dan realisasi Anggaran Tahun 2018	.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	.....	3
Gambar 1.2	:	Jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin tahun 2018	.....	4
Gambar 1.3	:	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku tahun 2013 – 2017	.....	5
Gambar 1.4	:	Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan tahun 2013 – 2017	.....	6
Gambar 1.5	:	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2017	.....	7
Gambar 3.1	:	Khatam alquran siswa-siswi TPA/TPSA	.....	33
Gambar 3.2	:	Salah satu siswi yang menerima sertifikat tamat mengaji	.....	34
Gambar 3.3	:	Anak –anak usia 13 sampai 15 tahun yang mengikuti kegiatan keagamaam di mesjid	.....	34
Gambar 3.4	:	Pembinaan terhadap perkembangan ternak masyarakat	.....	35
Gambar 3.5	:	Bibit ternak yang diditribusikan kepada msyarakat	.....	35
Gambar 3.6	:	Ekspose produk peternakan	.....	36
Gambar 3.7	:	Kontes ternak tingkat propinsi Sumbar	.....	36
Gambar 3.8	:	Petugas Puskeswan memberikan vaksinasi pada ternak	.....	36
Gambar 3.9	:	Kolam terpal budi daya	.....	37
Gambar 3.10	:	Pemberantasan hama tikus bersama masyarakat	.....	37
Gambar 3.11	:	Panen varietas padi putih “papanai” oleh kadis distan KP yang akan lanching tahun 2019	.....	38
Gambar 3.12	:	Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	.....	38
Gambar 3.13	:	Pembangunan jaringan tersier	.....	38
Gambar 3.14	:	Pembangunan Dam parit	.....	38
Gambar 3.15	:	Kepala Distan KP menyerahkan Hand traktor kepada kelompok tani	.....	39
Gambar 3.16	:	Armada brigade tanam	.....	39
Gambar 3.17	:	Penerapan pola tanam padi jajar legowo	.....	39
Gambar 3.18	:	Pelatihan petugas dan petani	.....	40
Gambar 3.19	:	Deminstrasi penggunaan rice transplanter	.....	40

Gambar 3.20	:	Demontransi penggunaan Thressher	.....	40
Gambar 3.21	:	Pemberantasan hama tupai bersama kelompik tani	.....	41
Gambar 3.22	:	Bantuan bibit kelapa pada kelompok tani	.....	41
Gambar 3.23	:	Sekolah Lapanga Sambung Sampoing Kakao	.....	41
Gambar 3.24	:	Pengarahan untuk akreditasi sekolah	.....	49
Gambar 3.25	:	Penanganan langsung yang dilakukan bidan desa di pemukiman penduduk	.....	51
Gambar 3.26	:	Bidan desa turun langsung ke pemukiman penduduk	.....	51
Gambar 3.27	:	Kerjasama dinas kesehatan dan KUA Kab. Padang Pariaman dalam pelaksanaan program Gernis PAPA	.....	51
Gambar 3.28	:	Pelaksanaan program PSC 119	.....	52
Gambar 3.29	:	Pelaksanaan Program Sabermas	.....	52
Gambar 3.30	:	Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa rokok	.....	53
Gambar 3.31	:	Pelaksanaan program LNPPG	.....	53
Gambar 3.32	:	Kerjasama spanduk gran Inna	.....	57
Gambar 3.33	:	Kerjasama website	.....	57
Gambar 3.34	:	Sarana dan bahan promosi wisata	.....	58
Gambar 3.35	:	Cik Uniang dn cik ajo	.....	58
Gambar 3.36	:	Paket wisata unggulan arung jeram di Lubuk alung	.....	59
Gambar 3.37	:	Program pembangunan jalan	.....	62
Gambar 3.38	:	Program rehabilitasi jalan	.....	62
Gambar 3.39	:	Renovasi rumah penduduk	.....	67
Gambar 3.40	:	Pembangunan drainase	.....	67
Gambar 3.41	:	Mobiul keliling program AJEB	.....	71
Gambar 3.42	:	Penyerahan Kartu Keluarga sejahtera	.....	74
Gambar 3.43	:	Penyerahan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mekar	.....	74
Gambar 3.44	:	Penyerahan beras sejahtera kepada keluarga miskin yang terdata dalam basis data terpadu	.....	75
Gambar 3.45	:	Penyerahan Adytia Karya Mahatva Yodha award	.....	76
Gambar 3.46	:	Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni An. Tisna Marni	.....	77
Gambar 3.47	:	Pelaksanaan capacity building Forum Anak	.....	77
Gambar 3.48	:	Pelaksanaan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan	.....	78
Gambar 3.49	:	Kegiatan pelatihan yang diadakan BLK	.....	81

Gambar 3.50	:	Bandara Internasional Minangkabau	.....	90
Gambar 3.51	:	Pembangunan asrama Haji	.....	91
Gambar 3.52	:	Pabrik coco mas sebagai salah satu industri olahan makanan yang ada di Padang Pariaman	.....	91
Gambar 3.53	:	Rencana Kawasan Pendidikan Tarok	.....	92
Gambar 3.54	:	Bupati Padang Pariaman menyerahkan Laporan Keuangan daerah tahun 2017 kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat	.....	96
Gambar 3.55	:	Bimbingan teknis penyususnan laporan keuangan SKPD dan PPK bendahara	.....	96
Gambar 3.56	:	Penghapusan aset BPBD bersama bidang aset BPKD terkait pengelolaan dan pengaruhnya terhadap laporan BMD	.....	97
Gambar 3.57	:	Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan OPD	.....	97
Gambar 3.58	:	Pelaksanaan cascading kinerja OPD	.....	99
Gambar 3.59	:	Coaching klinik SAKIP 2018	.....	100
Gambar 3.60	:	Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	.....	100
Gambar 3.61	:	Piagam penghargaan atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	.....	101
Gambar 3.62	:	Workshop penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2018	.....	103
Gambar 3.63	:	Survey kepuasan masyarakat yang dilaksnakan di Disdukcapil	.....	106
Gambar 3.64	:	Survey kepuasan masyarakat yang dilaksnakan di RSUD Padang Pariaman	.....	106
Gambar 3.65	:	Survey kepuasan masyarakat yang dilaksnakan di DPMPTP	.....	106
Gambar 3.66	:	Sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencanaan bersama camat dan wali nagari	.....	108

DAFTAR MATRIK

Matrik 4.1 : Masalah dan strateginya 120

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Angka harapan lama sekolah di Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 47

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 58 menjelaskan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder maka penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (dimensi eksternal) hal ini bermakna bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (*stakeholder*) atas capaian kinerja selama periode tahun 2018. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan. 2) Aspek Manajemen Kinerja (dimensi internal) hal ini bermakna bahwa LAKIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

B GAMBARAN UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km^2 dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dimana kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km^2, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km^2. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Solok
- Sebelah Selatan : Kota Padang
- Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman

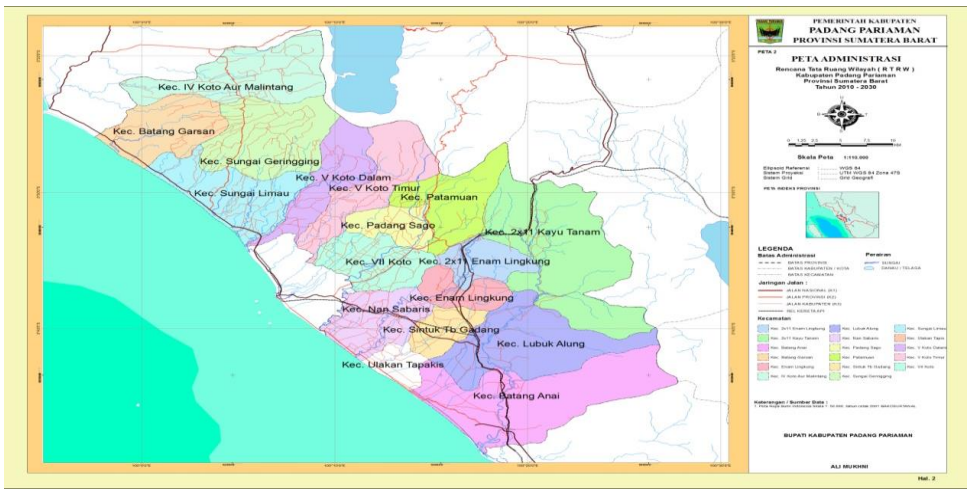

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 103 nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya mempunyai 3 (Tiga) nagari. Kecamatan VII Koto masih merupakan kecamatan yang memiliki korong terbanyak, yakni 66 korong, dan yang paling sedikit adalah kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, yakni 12 korong.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Sesuai dengan data BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018, rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah sebesar 376,17 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 16 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 25,58 derajat celcius dengan kelembaban relatif 87 persen dan tekanan udara rata-rata 996,3 milibar.

2. DEMOGRAFIS

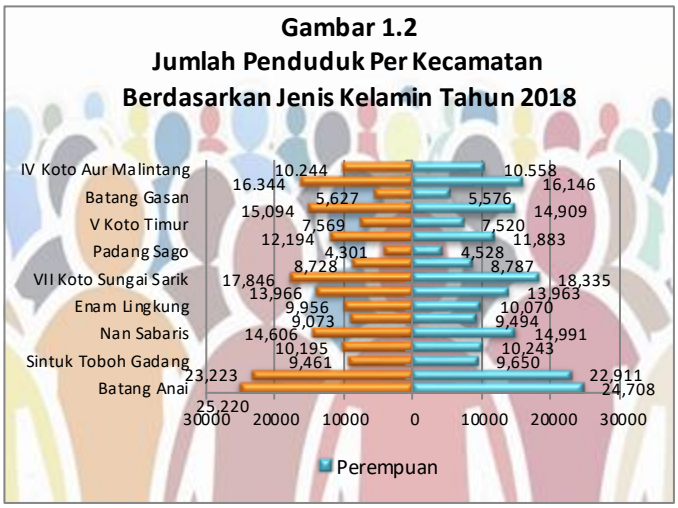

Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 terdapat sebanyak 427.919 jiwa, yang terdiri dari 213.647 laki – laki dan 214.272 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 462.125 jiwa (234.607 laki – laki dan 227.518 perempuan). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 ini terhitung sebanyak 322 jiwa/KM^2. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 49.928 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago 8.829 jiwa.

Jika dilihat perkembangan penduduk 5 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukan tren peningkatan dari 403.530 tahun 2014 menjadi 427.919 pada tahun 2018. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018

TAHUN	PENDUDUK			SEX RASIO	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km2)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
2014	198.315	205.215	403.530	96,64	305
2015	199.808	206.268	406.076	96,87	306
2016	201.130	207.482	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97,00	309
2018	213.647	214.272	427.919	99,70	322

3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut

kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp. 1.684.224,17 juta rupiah dari Rp. 17.521.183,33 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi Rp. 19.205.407,50 juta rupiah pada tahun 2017. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi.

Begitupun dengan PDRB atas harga konstans yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 657.223,56 juta rupiah dari tahun 2016. Pada tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstans tersebut hanya Rp. 11.693.363,44 juta rupiah dan pada tahun 2017 menjadi Rp.12.350.587,0 juta rupiah.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini dapat dilihat pada gambar 1.3 dan 1.4 berikut ini :

Gambar 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2013-2017

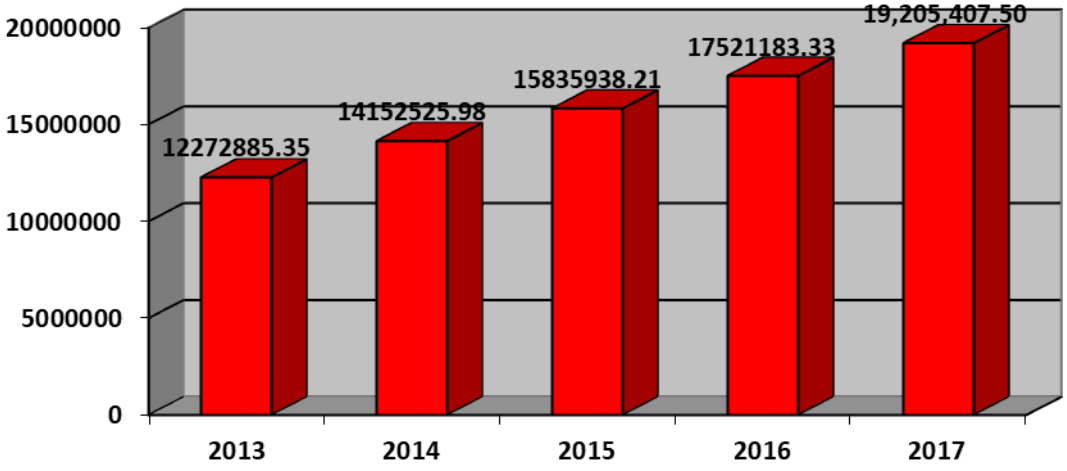

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2018

Gambar 1.4
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2013-2017

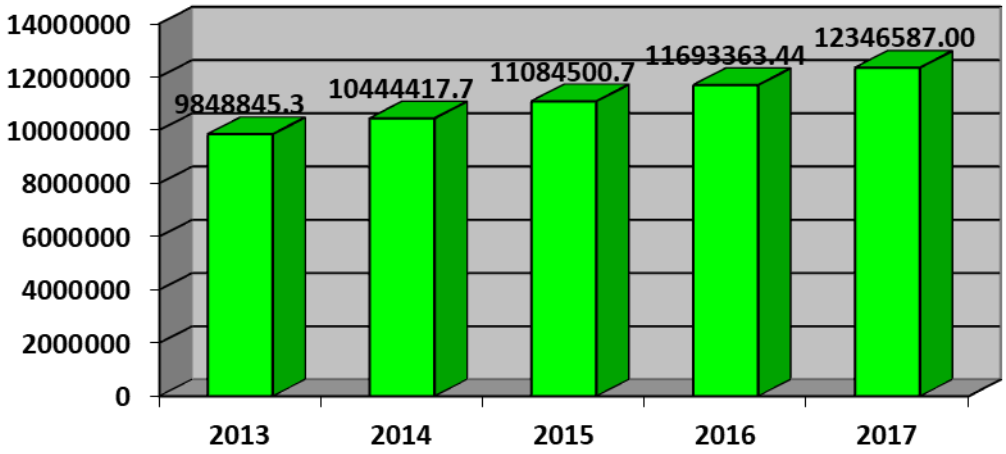

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2018

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman didukung berbagai sektor dalam perekonomian namun sektor yang dominan adalah sektor Pertanian dan sektor Angkutan dan Komunikasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai Rp. 3.731.537,4 milyar rupiah dan sektor transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 6.372.815,9 milyar rupiah serta besarnya peranan lapangan usaha kedua lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Padang Pariaman yang mencapai lebih dari 19 persen selama lima tahun terakhir.

Peranan PDRB menurut lapangan usaha didominasi oleh kategori transportasi dan pergudangan sebesar 33,18 persen, kategori pertanian, perikanan dan kehutanan 19,43 persen, kategori industri Pengolahan 10,15 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,31 persen, Kontruksi 7,39 persen, dan Pertambangan dan Penggalian 5,71 persen. Besarnya kontribusi transportasi dan pergudangan Keunggulan ini disebabkan karena Padang

Pariaman memiliki Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai. Pelayanan penerbangan di BIM bukan hanya domestik tetapi juga internasional. Pengguna jasa bandara juga bukan hanya penduduk Sumatera Barat tetapi juga penduduk propinsi tetangga yang dekat dengan Sumatera Barat atau penduduk yang berkepentingan menggunakan jasa penerbangan BIM.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 naik sebesar 12,35 triliun rupiah dibandingkan tahun 2016 yaitu 11,69 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5.52 persen.

Gambar 1.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013-2017

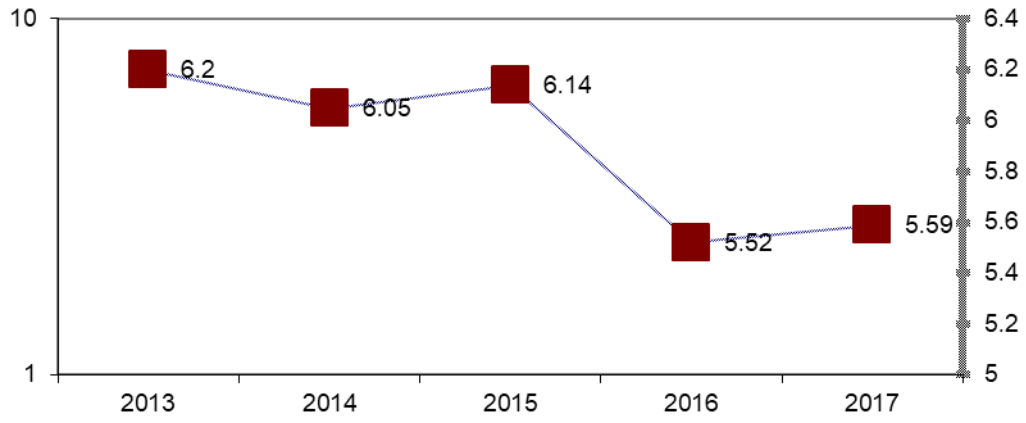

C STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 3 Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah dipimpin Oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 Bagian, 18 Dinas Daerah, 3 Badan, 1 Kantor , 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 BPBD serta 17 Kecamatan, 103 Nagari.

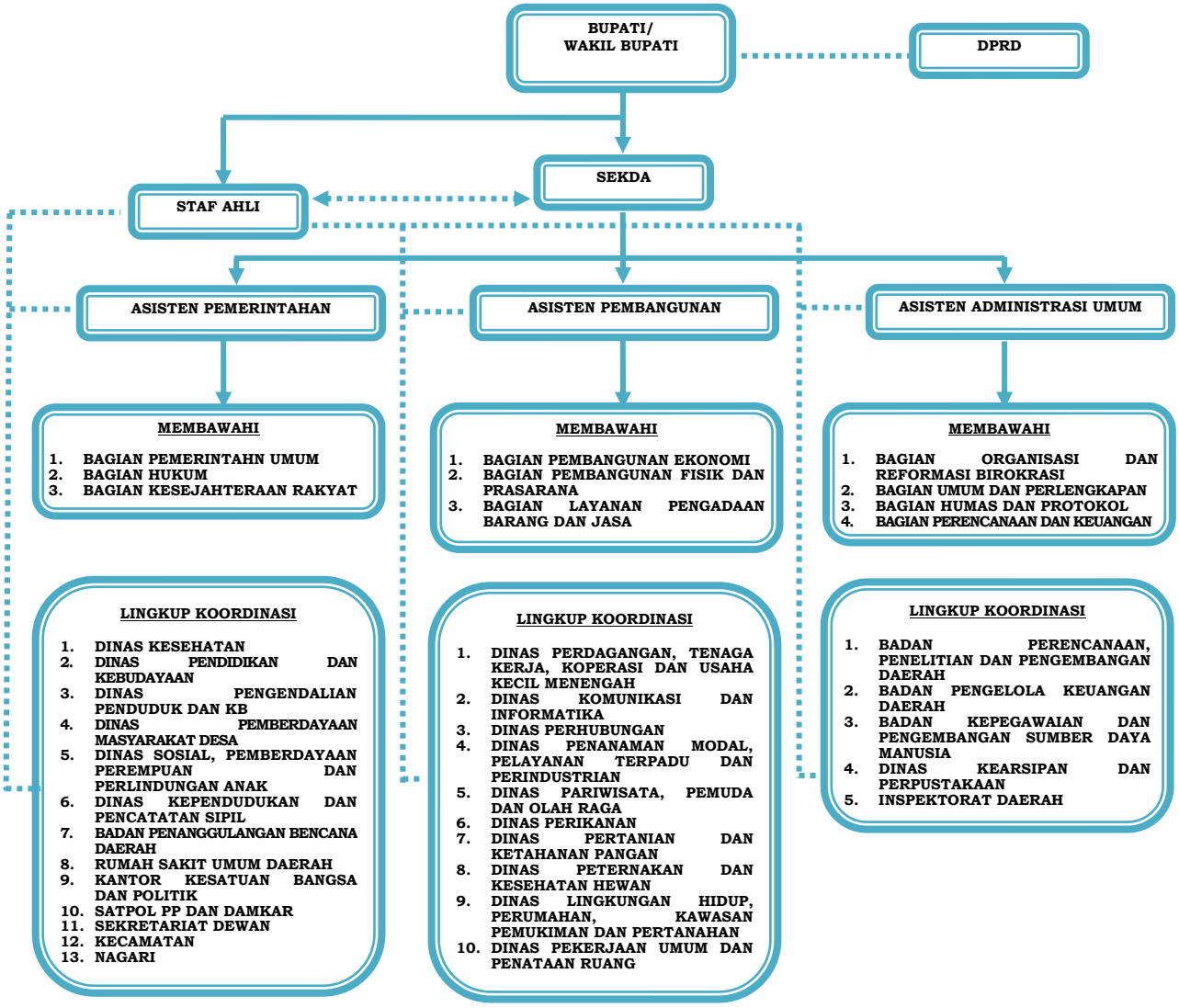

Keterangan:

→ Garis Komando

····· Garis Koordinasi

◄·····► Garis Koordinasi

D SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan data SIMPEG Tahun 2018 sebanyak 6.480 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.851 orang (28,6 %) dan perempuan sebanyak 4.629 orang (71,4 %).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1.	SD/Sederajat	25	4	29
2.	SLTP/Sederajat	53	10	63
3.	SLTA/Sederajat	438	522	960
4.	Diploma I	33	158	191
5.	Diploma II	123	476	599
6.	Diploma III	99	727	826
7.	Strata I	911	2581	3.492
8.	Strata II	169	151	320
9.	Strata III	0	0	0
	JUMLAH	**1.851**	**4.629**	**6.480**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas diketahui bahwa PNS di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat pendidikan srata 1 dengan jumlah 3.492 orang (53,9 %), diikuti dengan ijazah SLTA sederajat 960 orang (14,8 %)dan diploma 3 sebanyak 826 orang (12,7%). Tingkat pendidikan PNS ini menunjukan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 5.428 (83,77 %).

E ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

1. ISU STRATEGIS

Dalam RPJMD periode 2016-2021 Kabupaten Padang Pariaman akan mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang *Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera* dengan mengidentifikasi isu-isu strategis. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah
3. Peningkatan produksi komoditi unggulan
4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan
5. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan
6. Optimalisasi penerimaan daerah
7. Peningakatan akses dan layanan pendidikan
8. Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan
9. Peningkatan prestasi pemuda dan o;ahraga daerah
10. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
11. Pengembangan destinasi wisata
12. Pengembangan ekonomi kreatif
13. Pemberdayaan UKM, Industri Kecil Menengah, Koprasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri
14. Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah
15. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
16. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukkannya
17. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin
18. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
19. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif
20. Peningkatan jiwa kewirausahaan
21. Pemerataan ekonomi

22. Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan
23. Penyelenggaran tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan bersih

2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Pada bagian atau tahapan perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan pembangunan.

Permasalahan pokok pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Masih maraknya penyakit masyarakat,dan permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat seperti narkoba, LGBT, dan Perjudian. Dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat
2. Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal
4. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dimana IPM Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi Sumbar (Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata nasional dan Propinsi, Angka Harapan Hidup Masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi)
5. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap derajat kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih merata, perbaikan gizi, layanan kesehatan penduduk miskin dan perilaku hidup bersih dan sehat
6. Pemanfaatan lahan tidur belum optimal
7. Masih melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
9. Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan

10. Kemudahan berinvestasi di daerah
11. Peningkatan kualitas kehidupan beragama
12. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial
13. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana namun isu-isu *zonasi* ramah bencana belum menjadi arus pengarusutamaan (*mainstream*) dalam perencanaan pembangunan wilayah.

F SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan gambaran umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Padang Pariaman dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Kabupaten Padang Pariaman, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD tersebut, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu RPJMD ini juga menjawab tiga pertanyaan dasar, yakni: (1) kemana Kabupaten Padang Pariaman akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

A VISI DAN MISI

Dari berbagai macam isu strategis pada semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagaimana tertuang dalam "Visi dan Misi pembangunan" yaitu:

❖ VISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera"

Visi tersebut memiliki empat kata kunci yakni Menjadikan Kabupaten yang Baru, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. *Baru* yang dimaksud adalah suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
b. *Religius* yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari–hari.
c. *Cerdas* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
d. *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

❖ MISI

Untuk mencapai Visi "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera" ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
b. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
d. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.
g. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

❖ TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevalusi pelaksanaan misi yang telah disusun maka perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dapat digambarkan pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Peningkatan Pengamalan Agama	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca al-quran
		Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif
Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa	Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	Meningkatnya Konstribusi Sektor Primer Thdp PDRB
		Meningkatnya kesejahteraan petani
		Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan
		Meningkatnya mutu pendidikan
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah
	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatnya akses kesehatan
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya daya saing Wisata
		Meningkatnya kualitas destinasi Wisata
	Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi
		Meningkatnya kualitas infrastuktur pengairan
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman
	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas pengawasan terhadap kerusakan Lingkungan Hidup
	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan tata ruang
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	Meningkatnya Konstribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi
		Meningkatnya jumlah investor
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunya tingkat penganguran
		Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Meningkatnya tingkat pendapatan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif
Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan	Mewujudkan ketahanan bencana	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana
		Meningkatnya sarana prasarana ramah bencana

B STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya			
1 Peningkatan Pengamalan agama	1.1 meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	1.1.1 Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama	1.1.1.1 Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama
	1.2 meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif	1.2.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan	1.2.1.1 Optimalisasi peran Lembaga Sosial Keagamaan
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa			
Prioritas 2 : Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan			
1 Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	1.1 Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	1.1.1 meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah	1.1.1.1 Peningkatan pemakaian benih/bibit unggul bermutu
			1.1.1.2 Penataan jalur distribusi cadangan dan pasokan pangan
			1.1.1.3 Peningkatan ketersedian pangan secara berkelanjutan dan keragaman pangan
		1.1.2 Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian	1.1.2.1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pertanian
			1.1.2.2 Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif/berbasis masyarakat
		1.1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah	1.1.3.1 Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu produk dan yang disertifikasikan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.2.1	Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan	1.2.1.1	Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan
						1.2.1.2	Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
2		2.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	2.1.1	Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa	2.1.1.1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik							
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia							
1	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas pendidikan	1.1	Meningkatnya akses pendidikan	1.1.1	Meningkatkan Daya dukung pemerataan, mutu pelayanan pendidikan	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
						1.1.1.2	Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS
		1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	1.2.1	Pengembangan kompetensi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik	1.2.1.1	Meningkatkan Kualifikasi Akademik Pendidik dan tenaga kependidikan
				1.2.2	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan	1.2.2.1	Peningkatan Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
						1.2.2.2	Meningkatkan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
2		2.1.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah	2.1.1	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.1.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
				2.1.2	Peningkatan kompetisi olahraga	2.1.2.1	Peningkatan kualitas atlit, pelatih dan wasit
						2.1.2.2	Peningkatan apresiasi terhadap atlit dan pelatih yang berprestasi
						2.1.2.3	Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	2.1.3.1	Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga dan olah raga kemasyarakatan.
Prioritas 4 : Peningkatan Kesehatan Masyarakat							
2	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas kesehatan	3.1	Meningkatnya akses kesehatan	3.1.1	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	3.1.1.1	Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat
		3.2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	3.2.1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan	3.2.1.1	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Misi 4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.							
Prioritas 5 : Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan							
1	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama	1.1	Meningkatnya daya saing Wisata	1.1.1	Mengembangkan Destinasi Wisata	1.1.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasana wisata
						1.1.1.2	Peningkatan Promosi Wisata
						1.1.1.3	Pelestarian Nilai Budaya Daerah
		1.2	Meningkatnya kualitas destinasi Wisata	1.2.1	meningkatkan kompentensi peran pelaku wisata	1.2.1.1	Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
						1.2.1.2	Meningkatan SDM pelaku wisata
						1.2.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pelaku wisata
				1.2.2	Peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1.2.1.4	Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif
Prioritas 6 : Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang							
2	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	2.1	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	2.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	2.1.1.1	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2.1.1.2 Rehabilitasi jalan dan jembatan
			2.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi	2.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi
		2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	2.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	2.2.1.1 meningkatnya pembangunan jaringan irigasi
				2.2.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
		2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	2.3.1 Peningkatan akses Universal	2.3.1.1 Pengelolaan Layanan Air Bersih
				2.3.1.2 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
				2.3.1.3 Pengelolaan Sanitasi yang layak
3	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	3.1 Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	3.1.1.1 Penerapan aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3.2 Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH		
4	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	4.1 Meningkatnya pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan perencanaan tata ruang	4.1.2 Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	4.1.2.1 Pengembangan kawasan terpadu
			4.1.1 Menigkatkan kualitas perencanaan ruang	4.1.1.1 Penguatan kelembagaan Pengendalian pemanfaatan ruang
		4.2 Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan tata ruang		4.1.1.2 Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
Prioritas 7 : Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah				

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan trasnportasi	5.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, industri dan transporatsi terhadap PDRB	5.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen	5.1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana pasar dan peningkatan pasar tertib ukur
				5.1.2	Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan	5.1.2.1	Pengembangan sentra industri komoditi dan produk unggulan daerah
6	Meningkatnya jumlah investasi	5.2	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	5.2.1	Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah	5.2.1.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
		5.3	Meningkatnya jumlah investor			5.2.1.2	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.							
Prioritas 8 : Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran							
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**1.1**	Menurunnya jumlah penduduk miskin	1.1.1	Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar	1.1.1.1	Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Infrastruktur dan pelayanan dasar
				1.1.2	penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensiif	1.1.2.1	Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		1.2	Menurunnya tingkat pengangguran	1.1.3	Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru	1.1.3.1	Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan produktivitasnya
						1.1.3.2	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
		1.3	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluaga Sejahtera	1.1.4	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarg sejahtera yang berwawasan kependudukan	1.1.4.1	Meningkatkan Kesertaan KB
						1.1.5.1	Mewujudkan Grand Design Kependudukan berbasis pembangunan daerah

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						1.1.6.1	Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap program KKBPK
						1.1.7.1	Meningkatkan ketahan keluarga dan kesejahteraan keluarga
		1.4	Meningkatnya Pendapatan masyarakat		Peningkatan kesempatan berusaha	1.1.8.1	Berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik							
Prioritas 9 : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah							
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	1.1.1	Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah	1.1.1.1	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah berbasis aktual
				1.1.2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.1.2	Peningkatan Kinerja Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, aspiratif, dan partisipatif	1.2.1	Peningkatan kualitas pelayanan public	1.2.1.1	Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal
						1.2.1.2	Penerapan Standar pelayanan minimal, Standar operasional proosedur pada lingkup pemerintah daerah
			.			1.2.1.3	Meningkatnya Penggunaan Sistim Informasi Daerah

Misi 7 : Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.							
Prioritas 10 : Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.							
1	Mewujudkan	1.1	meningkatnya masyarakat	1.1.1	Nagari Tangguh bencana	1.1.1.1	Penyediaan informasi kebencanaan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	ketahanan bencana	yang tangguh bencana		
				1.1.1.2 Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana
				1.1.1.3 Peningkatan posko penangulangan bencana
				1.1.1.4 Penguatan regulasi dan kebijakan dalam penangulangan bencana
2		2.1 meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah bencana	2.1.1 Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat	2.1.1.1 Penyiapan sarana dan prasarana siaga tanggap darurat
			2.1.2 Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana	2.1.2.1 Rehab dan Rekon kawasan bencana

C INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Peningkatan Pengamalan agama	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran
2	Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian
		Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani
3	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B
4	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup
5	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata
6	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak
7	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh
8	Meningkatnya jumlah investasi	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor
9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan
10		Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita
11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

			Nilai LPPD
10	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD
11	Mewujudkan ketahanan bencana	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana

D PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016-2021 telah direvisi dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 , selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun Anggaran 2018 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 , dan kemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai oleh Bupati. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah. Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kabupaten Padang Pariaman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	70%
2	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.492.026,50
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	95,69
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60 tahun
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	43%
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,87 tahun
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	60.000 orang
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	61%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	46,3
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	78%
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	8
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	55
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8,53%
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7,72
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	45,8813 Juta Rp
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	B
		Nilai LPPD	3.25
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	76.61
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	Disdikbud, Setda (Kesra), Kecamatan
2	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	Distan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Disdikbud
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	Disdikbud
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan, RSUD
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	Disparpora
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	Dinas PUPR
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	Dinas PUPR, Bapelitbangda
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	DPMPTP
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	Dinas Sosial P3A, DPMD,Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distan KP, Disnak Keswan
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai LPPD	Setda, Seluruh Perangkat Daerah
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Semua OPD
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	BPBD, Satpol PP Damkar

A PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2\text{x Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.2. Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
85 ke atas	Sangat Berhasil
70 < x <85	Berhasil
55< x <70	Cukup Berhasil
x < 55	Kurang Berhasil

B PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja terdiri dari 18 (delapan belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang telah tertuang pada RPJMD tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Misi 1

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah							
Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	-	70 %	70%	100%	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	%	-	70%	70%	100%	Sangat Berhasil

Pada tabel terlihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran dari target sebesar 70% mampu terealisasi sebesar 70% artinya capaian mencapai 100 %. Indikator Kinerja "persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran" merupakan Indikator baru yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 sehingga tingkat pencapaian pada tahun 2017 tidak ada. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Gambar 3.1
Khatam Al - Qur'an Siswa – Siswi TPA/TPSA

Formulasi Pengukuran : $\frac{Jumlah\ Masyarakat\ Usia\ 13\ s.d\ 15\ tahun\ yang\ baca\ Al-Qur'an}{Jumlah\ \text{masyarakat usia 13 s/d 15 tahun}\ seluruhnya} x\ 100\%$

Namun untuk keberhasilan pencapaian kinerja ini diukur dari siswa SMP sederajat karena hanya tersedia data siswa SMP dan sederajat untuk mengukur ketercapaian kinerja pada indikator ini.

Hasil kinerja ini terwujud berkat upaya keras dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Kecamatan selaku koordinator masyarakat akan filsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sehingga misi satu pada sasaran meningkatnya persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran dapat dianggap tercapai dengan gemilang.

Kerja keras musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) Agama Islam di SMP, guru-guru madrasah tsanawiyah beserta guru agama pada satuan pendidikan sebelumya (SD/MI) ditambah dengan gencarnya sosialisasi dari pihak Kecamatan dan Nagari melalui magrib mengaji menjadi kunci pencapaian indikator ini. Selain itu, kepedulian pemerintahan nagari serta kesadaran masyarakat terhadap pembinaan anak-anak agar bisa baca alquran juga sangat tinggi. Pemerintahan nagari ikut melakukan program pembinaan terhadap TPA/TPSA yang ada di wilayahnya melalui bantuan sarana dan prasarana serta pemberian insentif/ honor bagi guru TPA dan TPSA.

Gambar 3.2
Salah Satu Siswi yang menerima Sertifikat Tamat Mengaji

Gambar 3.3
Anak-anak usia 13-15 tahun yang mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Misi 2

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa							
Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Sektor Primer dan Jasa							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp.3.484.872,07	Rp.2.492.026,50	Rp.3.731.537,4	149,74%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	96,97	95,69	95,13	99,41%	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2.	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp	Rp.3.484.872,07	Rp.2.492.026,50	Rp.3.731.537,4	149,74	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Tahun\ sekarang - PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Tahun\ lalu}{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Tahun\ lalu} x\ 100\%$

Nilai PDRB sektor pertanian Tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.2.492.026,50 dalam terealisasi sebesar Rp.3.731.537,4 dengan capaian sebesar 149,74. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebanyak Rp. 246.665,33.

Untuk meningkatkan Nilai PDRB sektor pertanian, program yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Program peningkatan hasil produksi peternakan
   Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan kegiatan diantaranya pelaksanaan penggadaan ternak dan pendistribusian langsung kemasyarakat melalui kelompok tani, percepatan produksi ternak melalui kawin buatan dalam rangka peningkatkankan kelahiran ternak/pedet, serta pembinaan dan sosialisasi terhadap perkembangan ternak masyarakat baik ternak masyarakat sendiri maupun ternak bantuan pemerintah.

Gambar 3.4
Pembinaan terhadap perkembangan ternak masyarakat

Gambar 3.5
Bibit ternak yang didistribusikan ke masyarakat

2. Program pemasaran produksi peternakan

   Melalui program ini dilakukan promosi hasil produk peternakan dengan mengikuti pameran ekspose produk peternakan di Pesisir Selatan , mengikuti kontes ternak tingkat Provinsi Sumbar dan pembinaan pengolahan hasil peternakan.

Gambar 3.6
Ekspose Produk Peternakan

Gambar 3.7
Kontes Ternak Tingkat Provinsi Sumbar

3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

   Program ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan seperti melakukan vaksinasi ternak.

Gambar 3.8
Petugas Puskeswan Memberikan Vaksinasi Pada Ternak

4. Program pengembangan budidaya perikanan

   Program ini berjalan melalui kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan yaitu dengan melakukan pemberian paket bantuan kolam terpal bundar yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 12 kolam terpal bundar melalui 6 Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) serta 31.800 ekor benih ikan yang berlokasi di Kec. Patamuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari pelaku usaha perikanan yang pada awalnya melakukan kegiatan perikanan melalui wadah budidaya dikolam tanah dengan komoditi ikan nila dan ikan gurami menjadi budidaya ikan dikolam terpal dengan komoditi ikan lele.

Gambar 3.9
Kolam Terpal Budidaya

5. Melakukan pengendalian hama dengan melibatkan stakeholders yang terkait seperti Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Nagari serta kelompok tani. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (Flame Blower). Pada tahun 2018 kegiatan perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman telah dilaksanakan pada delapan kelompok tani.

Gambar 3.10
Pemberantasan hama tikus bersama masyarakat

6. Dari segi pengembangan perbenihan tanaman pangan, Distan KP akan mengeluarkan sertifikat varietas unggul untuk tanaman padi yaitu varietas padi

"Putiah Papanai" yang telah melalui beberapa tahapan semenjak tahun 2017. Varietas ini dikembangkan karena dipandang cocok dan sesuai secara agroklimat untuk diterapkan di Padang Pariaman dan daerah lainnya di Sumatera Barat. Disamping produksinya tinggi, varietas ini dipandang mempunyai ketahanan terhadap serang hama penyakit wereng coklat.

Gambar 3.11
Panen Varietas Padi Putiah Papanai Oleh Kadis DistanKP yang akan launching tahun 2019

7. Dalam pengembangan infrastruktur pertanian, Distan KP terus berupaya untuk membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana pertanian, salah satunya sarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi ketiap areal/lahan kelompok tani. Adapun kegiatan yang mendukung pembangunan sarana irigasi yaitu Kegiatan Peningkatan Produktivitas Produksi Pertanian (DAK Bidang Pertanian) dan Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktivitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP). Output dari kegiatan ini berupa tersedianya jaringan irigasi tersier, dam parit, pompanisasi/pipanisasi dan jalan usaha tani.

Gambar 3.12.
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Gambar 3.13
Pembangunan Jaringan Tersier

Gambar 3.14
Pembangunan Dam Parit

8. Memberikan bantuan dan pinjaman alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat tani. Alsintan yang diberikan berupa pompa air, alat pengolahan tanah (handtraktor) dan sebagainya. Khusus untuk handtraktor DistanKP menyediakan pinjaman untuk masyarakat tani. Melalui Kegiatan Operasional Brigade Tanam masyarakat tani boleh meminjam pakai handtraktor yang ada pada DistanKP.

Masyarakat tani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan alsintan ini dengan mengajukan surat permohonan peminjaman.

Gambar 3.15
Kepala DistanKP Menyerahkan *Handtraktor* kepada Kelompok Tani

Gambar 3.16
Armada Brigade Tanam

9. Melakukan pemahaman teknis budidaya dengan cara mentransfer teknologi-teknologi baru kepada masyarakat tani. Beberapa tahun terakhir DistanKP menerapkan teknologi tanaman padi yang dikenal dengan tanaman jajar legowo. Diharapkan dengan penerapan teknologi ini dapat mengoptimalkan lahan persawahan yang diusahakan. Adapun manfaat penerapan pola tanam jajar legowo ini yakni: 1). Jumlah anakan tanaman padi semakin banyak, 2). Produktivitas padi akan meningkat, 3). Kualitas gabah akan semakin bagus, 4). Menggurangi tingkat serangan hama dan penyakit, 4). Mempermudah perawatan dan pemupukan, dan 6). Dapat menghemat penggunaan pupuk.

Gambar 3.17
Penerapan pola tanam padi jajar legowo

10. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh atau petugas lapangan serta peningkatan SDM dari petani itu sendiri. Peningkatan SDM petani dapat dilakukan melalui sekolah lapangan yang langsung diaplikasikan dilapangan. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas petugas, dilakukan dengan mengutus petugas tersebut untuk mengikuti pelatihan atau diklat-diklat kompetensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, provinsi ataupun oleh Kementan RI.

Gambar 3.18
Pelatihan petugas dan petani

11. Memberikan bantuan alat pasca panen berupa Thressher. Dengan penggunaan alat ini tentunya masyarakat tani akan terbantu sekali dalam penanganan pasca panen. Tahun 2017 DistanKP telah menyalurkan sebanyak 10 unit kepada 10 kelompok tani dan sebanyak 12 unit pada tahun 2018. Selain bantuan Thressher, untuk mengurangi kehilangan hasil pada pasca panen tanaman jagung DistanKP juga membantu alat pasca panen untuk tanaman jagung yaitu berupa corn seller (pemipil jagung). Pada tahun 2018 DistanKP menyalurkan sebanyak 2 unit corn seller. Dalam penerapan budidaya tanaman pangan, Distan KP menerapkan teknologi alsintan untuk menanam padi dan jagung. Alat dan mesin yang digunakan untuk menanam padi yakni *Rice transplanter*, sedangkan untuk jagung menggunakan *Corn transplanter*. Penggunaan alat ini akan lebih mengefisienkan waktu, serta dipandang lebih efektif karena pola tanamnya dapat diatur sesuai keinginan.

Gambar 3.19
Demontrasi penggunaan *Rice transplanter*

Gambar 3.20
Demontrasi penggunaan *Trhessher*

12. Melakukan pemberantasan hama tupai dengan melibatkan kelompok tani. Selama tahun 2017 sebanyak 8.992 ekor tupai yang telah diberantas, melalui Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan (Buru Tupai). Sedangkan tahun 2018 sebanyak 11.335 ekor. Disamping bantuan dari DistanKP, masyarakat

juga melaksanakan gerakan perantasan hama tupai secara swadaya dengan melibatkan unsur wali nagari dan wali korong.

Gambar 3.21
Pemberantasan hama tupai bersama kelompok tani

13. Mengadakan bibit tanaman kelapa yang bermutu tinggi untuk mengganti tanaman kelapa masyarakat tani yang sudah tidak produktif lagi. Bibit tanaman kelapa ini didistribusikan kepada masyarakat tani melalui kelompok-kelompok tani yang berada didaerah atau kawasan yang berpotensi untuk pengembangan tanaman kelapa. Pada tahun 2017 DistanKP telah menyalurkan 18.300 batang bibit kelapa kepada 29 kelompok tani, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 69.300 bantang kepada 66 kelompok tani. Kegiatan ini tertuang pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Gambar 3.22
Bantuan bibit kelapa kepada kelompok tani

Gambar 3.23
Sekolah lapang sambung samping kakao

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Dengan dilakukannya budidaya ikan lele yang termasuk dalam kategori ikan yang mudah didapatkan, cara perawatan yang lebih mudah, memiliki waktu panen yang tidak lama sehingga dapat meningkatkan Nilai PDRB sektor Pertanian.
2. Pemberian vaksinasi secara gratis kepala Kelompok Tani Ternak.

3. Sarana irigasi yang memadai sehingga dapat menjamin ketersediaan air bagi masyarakat tani.
4. Ketersediaan alat pertanian yang memudahkan dan mempercepat proses bercocok tanam.
5. Penerapan teknologi budidaya yang tepat pada masyarakat tani.

❖ Hambatan dan Masalah :

1. Tingginya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) atau serangan hama penyakit tanaman pangan, seperti hama tikus, burung, babi, wereng coklat, patogen cendawan, penyakit bulai dan sebagainya
2. Dampak fenomena iklim yaitu tingginya curah hujan
3. Serangan hama yang berisiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian.
4. Masih ada masyarakat tani yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi budidaya tani.

❖ Strategi Pemecahan Masalah :

1. Pembangunan/rehabilitasi sarana irigasi.
2. Pemberian bantuan/pinjaman alat pertanian pasca panen berupa Thressher dan Rice transplanter.
3. Transfer dan penerapan teknologi budidaya padi yang dikenal dengan tanam jajar legowo.
4. Penanganan hama yang melibatkan unsur wali nagari dan wali korong.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
3.	Nilai Tukar Petani	nilai	96,97	95,69	95,13	99,41	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{Indek\ yang\ diterima\ petani\ (lt)}{Indek\ yang\ dibayar\ petani\ (lb)} x\ 100\%$

Nilai Tukar Petani digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani berada pada posisi diatas 100

menunjukkan adanya peningkatan harga produsen atas hasil pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan harga kebutuhan petani, baik untuk konsumsi maupun untuk biaya produksi. Kondisi ini menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani terkait dengan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2018 realisasi Nilai Tukar Petani di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 95,13, hal ini belum mencapai target 100% dari yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 95,69. Meskipun demikian pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya "Sangat Berhasil", karena mencapai 99,41% dari target yang telah dirumuskan. Nilai Tukar Petani pada Tahun 2017 tercatat sebesar 96,97 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Tukar Petani Tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa petani Sumatera Barat selama Tahun 2017 lebih baik dibanding Tahun 2018, walaupun selama Tahun 2017 dan 2018 sama-sama mengalami defisit karena Nilai Tukar Petani yang kurang dari 100. Hal ini disebabkan pada periode tersebut Indeks Harga Produksinya selalu lebih rendah dari Indeks Harga Komsumsinya.

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perikanan di tahun 2018 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program:
   - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan:
     - Peningkatan kemampuan lembaga petani
     - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
     - Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
     - Pengembangan Nagari Model Kelapa
     - Pengembangan Produk Olahan Kelapa
     - Pelatihan petani dan Pelaku agribisnis tanaman pangan hortikultura
   - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), melalui kegiatan:
     - Penanganan daerah rawan pangan
     - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
     - Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
     - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
     - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
     - Pengembangan lumbung pangan desa
     - Pengembangan perbenihan/pembibitan
     - Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Penyuluhan sumber pangan alternatif
- Pemanfaatan Lahan Terlantar melalui Optimalisasi Lahan (OPL)
- Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Pengembangan usaha pertanian melalui peningkatan produktifitas lahan dan air (Pendamping Paralel WISMP2)
- Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air
- Pengadaan Alsintan
- Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Nagari Mandiri Pangan

• Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
  - Penunjang Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura

• Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
  - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
  - Pengembangan Usaha Pertanian Organik

• Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
  - Pengembangan Rehabilitasi Kelapa
  - Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan
  - Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Perkebunan (buru tupai)
  - Pengembangan Tanaman Hortikultura
  - Pengembangan tanaman perkebunan
  - Peningkatan Produktifitas Produksi Pertanian (DAK 2018)
  - Peningkatan produktivitas produksi pertanian (Pendamping DAK 2018)
  - Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah
  - Peningkatan Produksi Kakao Melalui Intensifikasi
  - Rehabilitasi tanaman kakao
  - Pembangunan/Rhabilitasi Insfrastruktur Pertanian
  - Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan

• Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, melalui kegiatan:
  - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
  - Peningkatan Kapasitas Petani

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program:

• Program peningkatan hasil produksi peternakan, melalui kegiatan:
  - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
  - Pelayanan Inseminasi Buatan
  - Penyuluhan dalam rangka pembinaan dan sosialisasi terhadap perkembangan ternak masyarakat

- Program pemasaran produksi peternakan, melalui kegiatan:
  - Promosi hasil produk peternakan
  - Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, melalui kegiatan:
  - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
  - Pelayanan Kesehatan hewan
  - Pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung
  - Pengawasan Kesmavet

3. Dinas Perikanan melalui program:
   - Program pengembangan budidaya perikanan, melalui kegiatan:
     - Pengembangan Wirausaha Perikanan

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Penerapan teknologi yang tepat guna.
2. Penggunaan bibit dan pupuk yang bermutu.
3. Pengendalian hama-penyakit yang baik.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Misi 3

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,55	13,60	13,56	99,71%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	56,47 %	43 %	80,34 %	186,84 %	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan							
3.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	67,80	69,87	67,96	97,27%	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Akses Pendidikan

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 4

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,60	13,56	99,71	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel 3.9 di atas diketahui bahwa realisasi indikator Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2018 adalah 33,56. Realisasi ini belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 13,55. Meskipun demikian, tingkat capaian Indikator ini dikategorikan "sangat berhasil" dengan persentase capaian sebesar 99,71%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,01 % pada tahun 2018.

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan formula :

Formulasi Pengukuran : Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki.

Angka Harapan Lama Sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Angka Harapan Lama Sekolah berdasarkan data dari BPS menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

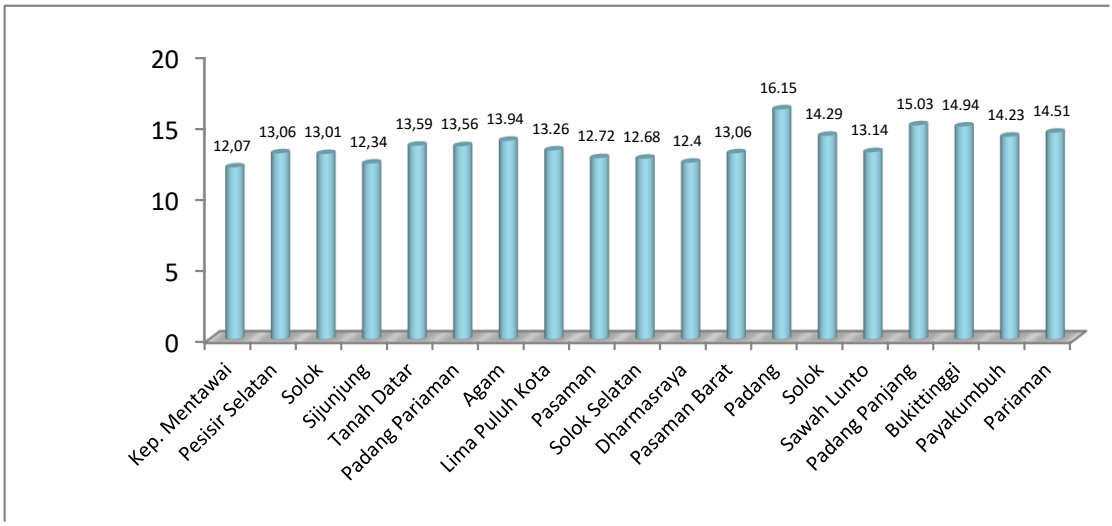

Grafik 3.1

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman berada pada posisi 9 dari 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi di Sumatera Barat berada di Kota Padang dengan capaian 16,15 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman ini masih dibawah capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 13,94 tahun.

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

❖ Hambatan dan Masalah

1. Pendidikan non formal masih belum tersentuh secara luas di masyarakat.
2. Faktor Kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah.

3. Topografi, Padang Pariaman terdiri sebagian berbukit dan terjal sehingga rawan untuk dilewati dan kawasan permukiman yang berjauhan dari sarana pendidikan.
4. Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya "marantau", ikut saudara berdagang ke daerah lain.

❖ Strategi pemecahan masalah:

1. Perbaikan infrastruktur untuk peningkatan akses ke sekolah
2. Meningkatkan prasarana seperti: Bus sekolah.
3. Menambah anggaran operasional sekolah.
4. Mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.
5. Perlu penganggaran yang lebih tepat dan memadai.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Mutu Pendidikan

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 5

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
5.	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	%	56,47	43	80,34	186,84	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 realisasi Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 80,34% melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 43%. Capaian kinerja untuk indikator ini termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil", karena mencapai 186,84% dari target yang telah dirumuskan. Tingkat pencapaian indikator ini juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 yaitu 56,47.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula :

Formulasi Pengukuran : $\frac{Jumlah\ pendidikan\ dasar\ terakreditasi\ B}{Jumlah\ pendidikan\ dasar\ seluruhnya} x\ 100\%$

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilaksanakan oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) dengan tahapan 1)Penetapan Sasaran sekolah/madrasah, 2)Sosialisasi dan penyampaian perangkat akreditasi, 3)Pengisian dan Pengiriman Instrumen Akreditasi, 4)Penetapan Kelayakan Sekolah/Madrasah dan Penugasan Asesor, 5)Visitasi Ke Sekolah/Madrasah, 6)Validasi Proses dan Hasil Visitasi, 7)Verifikasi Hasil Validasi dan Penyusunan Rekomendasi, 8)Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi, 9)Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi, 10)Sosialisasi Hasil Akreditasi

Gambar 3.24
Pengarahan Untuk Akreditasi Sekolah

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Mayarakat

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Strategis 6

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
6.	Angka Harapan Hidup	Persen	67,80	69,87	67,96	97,27%	Berhasil

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diketahui bahwa realisasi capaian Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 adalah 67,96 persen dan capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 67,80. Capaian realisasi pada tahun 2018 ini dikategorikan Sangat Berhasil yaitu sebesar 97,27%.

Pengukuran indikator ini dilakuikan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang

Dalam rangka meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Padang Pariaman Sehat

   Pariaman Sehat ini bertujuan memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan terhadap masalah kesehatan dimasyarakat. Pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal dengan memegang prinsip berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya Program Padang Pariaman Sehat mengakibatkan terwujudnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai & profesional, teratasinya kasus-kasus penyakit dan masalah kesehatan yang ditemukan langsung oleh bidan desa dan petugas kesehatan dan segera ditindaklanjuti, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dalam masalah kesehatan lainnya,

dan tersedianya biaya melalui Badan Amil Zakat Nasional Daerah Padang Pariaman.

Gambar 3.25
Penanganan Langsung Yang Dilakukan Bidan Desa Di Pemukiman Penduduk

Gambar 3.26
Bidan Desa Turun Langsung Ke Pemukiman Penduduk

2. Program Gerakan Nikah Sehat adang Pariaman (GERNIS PAPA)

Gernis Papa merupakan gerakan pernikahan sehat Padang Pariaman. Gernis Sehat ini merupakan gerakan yang diperuntukkan untuk setiap pasangan yang akan menikah wajib melakukan pemeriksaan HIV. Apabila pasangan tersebut tidak melakukan pemeriksaan HIV maka KUA tidak akan menikahkan pasangan tersebut.

Gambar 3. 27
Kerjasama Dinas Kesehatan dan KUA Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan program GERNIS PAPA.

3. Program Padang Pariaman Tanggap Kasus Gawat Darurat (PAPA TANGKAS GADA) PSC 119.

Program ini merupakan wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami kegawatdaruratan. Dalam menjalankan fungsinya Pos Yan Gadar Terpadu berperan untuk:

a. Mempercepat respone time penanganan korban kegawatdaruratan Pra Rumah Sakit.

b. Mempercepat proses evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat.
c. Mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan.

Gambar 3. 28
Pelaksanaan Program PSC 119

4. Program SABERMAS (Satu Malam Bersama Masyarakat)

Program ini merupakan program intervensi terintegrasi pelayanan kesehatan dengan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan secara tuntas untuk mewujudkan nagari sehat menuju Padang Pariaman Sehat. Gerakan ini dilakukan di wilayah Puskesmas yang kinerjanya jauh dari target kinerja yang ditetapkan. Di kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan permasalahan apa saja yang tejadi di wilayah tersebut sehingga semua permasalahan dapat dipecahkan.

Gambar 3. 29
Pelaksanaan Program Sabermas

5. Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Telah di tetapkannya Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak

bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Gambar 3.30
Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

6. Program LNPPG (Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi)

   Program ini merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan intensif kepada ibu hamil mulai dari awal pertama kehamilan sampai anak usia 24 bulan (1000 HPK) melalui pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Laskar Nagari Peduli Gizi mengintervensi semua permasalah gizi yang ada mulai dari masalah gizi masyarakat sampai ke masalah gizi individu dengan kerjasama lintas sektor dan lintas program yang baik terkait dengan memaksimalkan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Gambar 3.31
Pelaksanaan Program LNPPG

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

   Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya.

   Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan, adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Mwenular
3. Promosi Kesewhatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan
5. Pengawasan Obat dan makanan
6. Perbaikan Gizi masyarakat
7. Pengembangan Lingkungan sehat
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
10. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
12. Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dasn anak

- Hambatan dan Masalah
  1. Belum optimalnya kualitas dan kwantitas pelayanan kesehatan dasar serta pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang dimiliki di puskesmas.
  2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
  3. Belum optimalnya promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat.
  4. Fungsi Puskesmas masih dominan sebagai kuratif (pengobatan), belum optimal dalam upaya promotif dan preventif.
  5. Alokasi anggaran bidang kesehatan masih belum sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu 15% dari APBD
  6. Upaya peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jaminan Kesewhatan Nasional (JKN), Penerima Bantuan Iuran APBN dan APBD.
- Strategi pemecahan masalah:
  1. Memberikan pelatihan kepada petugas untuk meningkatkan kompentisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melengkapi kekurangan SDM yang ada melalui rekruitmen BLUD di Puskesmas.
  2. Menguatkan kerjasama lintas sektor dalam menuntaskan masalah kesehatan pada masyarakat.
  3. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat secara lebih aktif.

4. Mengoptimalkan fungsi puskesmas dalam upaya kesehatan secara promotif dan preventif melalui kegiatan-kgiatan luar dan dalam gedung.
5. Penguatan dari anggaran Pusat (DAK), APBD dan pola integrasi baik yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK) maupun daerah seperti ADD (Alokasi Dana Desa).
6. Menambah peganggarkan untuk kepesertaan bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penerima Bantuan Iuran APBN, Penerima Bantuan Iuran APBD.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Misi 4

Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan							
Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	156.445 orang	60.000 orang	183.600 orang	306%	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas							
2.	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	45,32	61 %	46,98	77,01%	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	42,26	46,3	47,12	101,77%	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	77	78	75	96,15%	Sangat Berhasil
Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan							
5.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	6	8	7	87,5	Sangat Berhasil
Tujuan 4 : Meningkatnya Jumlah Investasi							
6.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	61 investor	55 investor	69 investor	125,45%	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 7

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
7.	Jumlah kunjungan wisata	orang	156.445	60.000	183.600	306%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2017 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan yang sangat besar dari 156.445 orang menjadi 183.600 orang. Capaian realisasi pada tahun 2018 ini dikategorikan "Sangat Berhasil" yaitu sebesar 306%. Jika dibandingkan jumlah kunjungan wisata Tahun 2017 dengan jumlah kunjungan wisata Tahun 2018 yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan, untuk kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 152.445 orang pada tahun 2017 menjadi 179.316 orang pada tahun 2018. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 4.000 orang pada tahun 2017 menjadi 4.284 orang pada tahun 2018.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Jumlah Wisatawan Tahun Sekarang

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

     Kegiatan ini pengembangan jaringan promosi pariwisata ini dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi kegiatan secara internal dan eksternal dengan bentuk kegiatan kerjasama promosi dengan stekholder yang mendukug promosi ODTW melalui media elektronik (Haluan Elektronik, RRI Padang, Radio Sushi FM, Radio Respon FM, Facebook) dan melalui berbagai event pameran dan ekspo hasil produk UKM.

Gambar 3.32
Kerjasama Spanduk Grand Inna

Gambar 3.33
Kerjasama Website

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

  Kegiatan ini merupakan promosi pariwisata yang telah mengikuti kegiatan Sumbar Expo di Jakarta yaitu menampilkan nilai-nilai seni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
- Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata

  Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan baliho/spanduk pada objek-objek wisata,brosur, shopping bag.

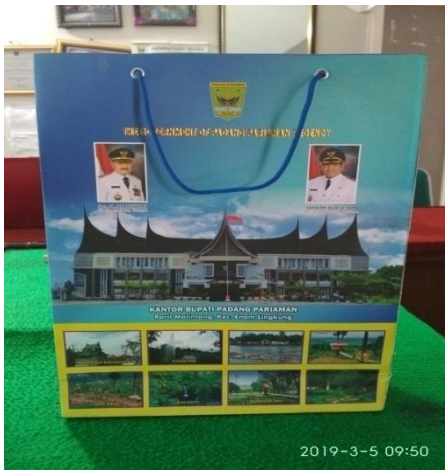

Gambar 3.34
Sarana dan Bahan Promosi Wisata

- Pemilihan Cik Uniang dan Cik Ajo

  Merupakan pemilihan untuk menjadi Duta Pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman yang akan mempromosikan keragaman yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman yang waktu telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret s/d 4 Mei 2018 dan acara Grand Final dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018 di Lapangan GOR Sungai Sarik.

Gambar 3.35
Cik Uniang dan Cik Ajo

- Apresiasi Seni dan Pertunjukan

  Kegiatan ini merupakan pertunjukan atau penampilan kesenian di objek-objek wisata dan penampilan kesenian dalam rangka acara resmi, penyambutan tamu pemerintah pusat maupun daerah.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

     Kegiatan ini merupakan pembangunan sarana dan prasaran pariwisata di objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten padang Pariaman berupa renovasi homestay, pembangunan loket tiket di objek wisata, pengadaan perlengkapan homestay dan alat pendukung aktifitas di objek wisata.
   - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

     Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas pariwisata berupa pembangunan sarana dan prasarana di objek wisata Nyarai, Kampung Bendang, Lubuk Batu Palimauan dan Pantai Kataping
   - Pengembangan Jenis Paket wisata Unggulan

     Kegiatan ini dilaksanakan di objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang berguna untuk menarik pengunjung yang datang ke objek wisata. Dan pada tahun ini yang berkembang sangat pesat yakni Paket Wisata Arung Jeram yang dikelola oleh Kelompok Lubuk Alung Adventure.

Gambar 3.36. Paket Wisata Unggulan Arung Jeram di Lubuk Alung

   - Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

     Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan pariwisata daerah yang meliputi penyusunan dan penetapan regulasi pendukung sektor pariwisata, pengembangan kawasan dan daya tarik wisata, peningkatan SDM Pariwisata dan pemberdayaan masyarakat dikawasan objek wisata.
3. Program Pengembangan Kemitraan
   - Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

     Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan para pelaku pariwisata yang profesional yang disebut Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 14 (empat belas) kelompok yakni :

Tabel 3.14
Nama Kelompok Sadar Wisata Berdasarkan Lokasi Wisata

No.	Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1.	Air Terjun Nyarai	Lubuk Alung	Wisata Minat Khusus
2.	Pantai Panjang	Kataping	Wisata Bahari/Kuliner
3.	Baburay	Kampung Dalam	Wisata Alam
4.	Lubuk Bonta	2 X 11 Kayu Tanam	Wisata Alam
5.	Baburai Sipisang dan Bukik Sapan	Tandikek	Wisata Alam
6.	Pantai Tiram	Ulakan	Wisata Bahari/Kuliner
7.	Gua Aie Ilang	Lubuk Alung	Wisata Alam
8.	Pantai Arta Indah	Sei. Limau	Wisata Bahari
9.	Air Terjun Sarasah	Batang Anai	Wisata Alam
10.	Bukik Siriah/Mountain View	Sei. Geringging	Wisata Alam
11.	Air Terjun Pelangi	Lubuk Alung	Wisata Alam
12.	Pantai Barcelona	Batang Gasan	Wisata Bahari
13.	Pantai Gasan Lestari	Batang Gasan	Wisata Bahari
14.	Pantai Arta Permai	Sei.Limau	Wisata Bahari

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, upaya keras dari personil yang ada di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan pengembangan di objek wisata.
2. Beberapa objek wisata yang sudah terkelola dengan baik yang dapat memandu para wisatawan yang berkunjung sehingga memberikan rasa aman bagi wisatawan
3. Sudah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ditetapakan dengan Surat Keputusan Bupati.
4. Tersedianya Paket Wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata
5. Melibatkan para pelaku ekonomi kreatif pada Event di tingkat daerah dan nasional sehingga menimbulkan semangat kepada para pelaku untuk meningkatkan kreativitas yang berdampak pada peningkatan omset pelaku tersebut.

❖ Hambatan dan Masalah

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi pembangunan sarana dan prasarana karena faktor sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu melihat kepentingan dan nilai manfat yang lebih besar dalam jangka panjang
2. Kurangnya peningkatan efektifitas dalam koordinasi dan singkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional

3. Kurangnya koordinasi dan sinergi pengembangan yang efektif baik secara horizontal maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap pemangku kepentingan pariwisata.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 8

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
8.	Persentase Jalan Mantap	%	45,32	61	46,98	77,01%	Berhasil

Capaian indikator ini dapat dilihat dari tabel diatas belum mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 61 % dengan realisasi capaian hanya 46,98 %. Meskipun demikian capaian keberhasilan indikator dikategorikan "Berhasil" yaitu sebesar 97,37%. Persentase jalan mantap merupakan indikator yang menggambarkan kualitas infrastruktur transportasi baik jalan nasional, provinsi maupun Kabupaten. Sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, indikator ini ditetapkan sebagai salah satu dari Indikator Kinerja Utama.

Kondisi Jalan Yang Ada di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 – 2018

No.	Uraian	TAHUN	
		2017	2018
1	Kondisi Baik	939,25	973,65
2	Kondisi Sedang	257,65	258,85
3	Kondisi Rusak ringan	681,50	660,90
4	rusak berat	194	179
5	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, kabupaten/kota)	2072.40	2072.40
Persentase Jalan Mantap		**45,32%**	**46,98 %**

Persentase jalan mantap diukur dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : $\frac{Panjang\ jalan\ kondisi\ baik}{Panjang\ jalan\ seluruhnya} x\ 100\%$

Dibandingkan dengan Tahun 2017 persentase jalan mantap Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan 1,72 %, dimana tahun 2017 capaian persentase jalan mantap 57,75 % dan tahun 2018 adalah 59,4%.

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu : 1). Pembangunan jalan; 2). Pembangunan Jalan Jembatan; 3). Penilaian Kondisi Jalan; 4). Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan; 5). Pembangunan Jalan dan Jembatan (Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Provinsi Sumbar Tahun 2018)

Gambar 3.37.
Program Pembangunan Jalan

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan melalui 3 (tiga) kegiatan: 1). Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (Pendamping DAK); 2). Pemeliharaan rutin jalan; 3). Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler);

Gambar 3.38.
Program Rehabilitasi Jalan

- Faktor Pendukung Kerberhasilan capaian Indikator :
  1. Penilaian kondisi jalan yang akurat
  2. Pendanaan
  3. Perencanaan jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalulintas
  4. Pemeliharaan jalan secara rutin, berkala dan periodic
  5. Penanganan jalan sesuai dengan umur rencana
  6. Operasional jalan sesuai batas tanasenya.

- Hambatan dan Masalah
  1. Kegiatan tahun 2018 hampir 80% pekerjaan aspirasi (Pokir DPRD) dan sebahagian besar pekerjaan tersebut yang ditangani adalah jalan status non Kabupaten, sehingga kenaikan persentase jalan Kabupaten pertumbuhan mantapnya kecil. Beberapa ruang jalan yang telah habis umur rencana yang dominan rusak ringan dan rusk berat telah diusulkan oleh dinas PUPR tidak terlaksana karena defisit anggaran.
  2. Adanya aktifitas kegiatan bersifat Nasional seperti pekerjaan Anai II dimana akes jalan yang digunakan adalah jalan Kabupaten akibat ada beberapa ruas dalam kondisi rusak berat dan ringan, hal ini berdampak berkurangnya persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Padang Pariaman.

- **Strategi Pemecahan Masalah:**
  1. Percepatan proses pemaketan pekerjaan sehingga alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan ataupun pemeliharaannya dapat dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini akan meminimalisir hal-hal pemotongan dana akibat kelalaian pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
  2. Peningkatan mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, dengan mempergunakan bahan yang baik walaupun dibenturkan oleh hal biaya yang ada, karena nilai dari suatu proyek ialah kesesuaian dengan metode teknis yang telah direncanakan.
  3. Peningkatan pengawasan melalui penambahan kuantitas dan kualitas pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga fungsi pengawasan dan pemeliharaan dapat dioptimalkan dan meminimalisir ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan melalui rehabilitasi saluran drainase yang baik di pinggir jalan karena sistem pembuangan air yang kurang baik akan semakin cepat merusak jalan tersebut.
5. Optimalisasi dalam perencanaan teknis pembangunan jalan, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang akan mempergunakan jalan tersebut.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 9

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
9.	Rasio jaringan irigasi	rasio	42,26	46,3	47,12	101,77%	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{Panjang\ saluran\ irigasi}{Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian}$

Rasio Jaringan Irigasi memiliki target sebesar 46,3 dengan realisasi capaian 47,12. Dengan demikian indikator ini telah mencapai target dan capaian keberhasilannya dikategorikan “Sangat Berhasil” yaitu sebesar 101,77%.

Rasio Jaringan Irigasi memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu : 1). Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi; 2). Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; 3). Infrastruktur irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan); 4). Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan; 5). Operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi; 6). Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP); 7). Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Provinsi Sumbar Tahun 2018).
2. Program Pengendalian Banjir melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : 1). Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

❖ Faktor pendukung keberhasilan Capain Indikator rasio jaringan irigasi :

1. Kondisi fisik/infrastuktur jaringan irigasi

2. Berjalannya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan baik
3. Tersedinya petugas OP Irigasi dalam jumlah yang dibutuhkan dan mempunyai kinerja yang baik
4. Adanya kepatuhan masyarakat pemakai air irigasi untuk mentaati proses operasi irigasi yang dijalankan petugas OP irigasi.
5. Dukungan dan partisipasi dari kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi.
6. Penilaian terhadap kinerja jaringan irigasi dilakukan wawancara terhadap pengelola dan analisis biaya satuan operasi dan pemeliharaan (factor non fisik) dan evaluasi kondisi prasarana jaringan irigasi (fisik termasukketersediaan air) dengan panduan penerapan pola dan tata tanam secara konsisten.
7. Kondisi ketidakberdayaan petani dalam pemeliharaan prasarana irigasi peril dibina secara terus menerus berdasarkan skala priotitas.

❖ Hambatan dan Masalah

1. Realisasi rasio jaringan irigasi yang tidak sesuai target disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
2. Terdapat beberapa derah irigasi yang telah dilakukan perbaikan mengalami kerusakan karena terkena dampak bencana alam.

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 10

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
10.	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	%	77	78	75	96,15%	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ bersanitasi\ layak}{Jumlah\ rumah\ tangga\ seluruhnya} x\ 100\%$

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak memiliki target sebesar 78% dengan realisasi capaian 75%. Meskipun indikator ini tidak mencapai target akan tetapi capaian keberhasilannya dikategorikan "Sangat Berhasil" yaitu sebesar 96,15 %. Capaian realisasi tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila memiliki fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan dan dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah (SPAL).

Untuk meningkatkan rumah tangga bersanitasi layak , Pemerintah Daerah Padang Pariaman melakukan beberapa program diantaranya :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu : 1). Identifikasi peta jaringan air minum Padang Pariaman ; 2). Pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DAK Penugasan); 3). Pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DDUB); 4). Lanjutan Pamsimas; 5). Percepatan pelaksanaan pembangunan penyehatan pemukiman; 6). Penyusunan DED air bersih.
2. Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu : 1). Penyediaan sarana sanitasi; 2).Operasional kegiatan penyediaan sarana sanitasi (SANIMAS); 3). Penyediaan sarana sanitasi (DAK Penugasan); 4). Penyediaan sarana sanitasi (DAK reguler).
3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : 1). Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 2).DED drainase

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

1. Program pengembangan perumahan

   Program ini berjalan dengan melakukan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan penunjang fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan capaian :

   - Sebanyak 50 unit dari kegiatan BSPS NAHP di Kecamatan Sungai Geringging
   - Sebanyak 100 unit dari kegiatan BSPS NAHP di Kecamatan Batang Gasan
   - Sebanyak 60 Unit dari kegiatan BSPS di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
   - sebanyak 408 unit dari kegiatan DAK perumahan dan 30 unit dari kegiatan BSPS di Kecamatan Lubuk Alung

- Sebanyak 100 unit dari kegiatan BSPS NHAP di Kecamatan Ulakan Tapakis

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%
Atap: Seng Lantai : Semen Dinding: Bata	Atap: Lantai : Semen Dinding: Bata	Atap: Seng Lantai : Semen Dinding: Bata

Gambar 3.39
Renovasi Rumah Penduduk

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

   Pelaksanaan program ini berupa pembangunan drainase permukiman yang dilaksanakan di Korong Kampung Apar Tengah, Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai sepanjang 161 meter.

Gambar 3.40
Pembangunan drainase

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Petanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Program pengembangan perumahan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat sehingga Kabupaten Padang Pariaman menerima berbagai jenis kegiatan terkait penyediaan perumahan bagi masyarakat, seperti BSPS dan BSPS NAHP.
2. Banyaknya kegiatan pemerintah pusat dan provinsi yang di alokasikan pada Kabupaten Padang Pariaman, ikut menunjang upaya peningkatan jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

❖ Hambatan dan Masalah

1. Masih adanya Terdapat beberapa oknum masyarakat yang kurang mendukung dalam pembangunan drainase pemukiman.

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Strategis sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 11

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
11.	Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	kawasan	6	8	7	87,5	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : *Jumlah Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh*

Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berhasil terwujud adalah 7 kawasan dari 8 kawasan yang ditargetkan. Persentase capaian indikator ini mencapai 87,5 persen dengan kategori Sangat Berhasil.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Diantaranya :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Kegiatan :

   - Pembangunan gedung kantor
   - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   - Perencanaan Pembangunan Gedung
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan :

- Pembangunan/peningkatan infrastruktur
- Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman

Jumlah Kawasan Strategis :

1. Pembangunan Kakao
2. Pembangunan Mesjid Syeh Burhanuddin (Tiram)
3. Pembangunan kawasan IKK
4. Pembangunan jalan kawasan tarok
5. Flay over (jalan duku – Sicincin)
6. Pembangunan tempat wisata
7. Pembangunan Asrama haji
8. Pembangunan tempat wisata jajang seribu Kec. Sungai Geringging

❖ Faktor pendukung keberhasilan capaian Indikator kawasan strategis :

1. Pembebasan lahan yang tersedia tempat kawasan
2. Dukungan dari pimpinan dan masyarakat sehingga bisa menunjang perekonomian
3. Anggaran / pagu yang mendukung terlaksananya kawasan tersebut.
4. Letak tata ruang yang sudah memadai

❖ Hambatan dan Masalah

Masih ada pembebasan lahan yang belum terealisasi hal ini yang menyebabkan pembangunan belum bisa dilaksanakan karena masyarakat menutut ganti rugi lahan yang dimilikinya. Dengan adanya anggaran yang terbatas atau deficit tidak bisa melaksanakan kegiatan yang maksimal hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya Jumlah Investor

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 12

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
12.	Jumlah Investor	Investor	61	55	69	125,45	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Pada Indikator Kinerja Utama ini mencapai target yang telah ditetapkan dimana capaiannya masuk kategori "Sangat Berhasil" yaitu sebesar 125,45%. Pada tahun 2018, jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman 69 investor. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkkan sebanyak 55 investor serta mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 61 investor. Terdapat 2 jenis penanaman modal di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang pelaku usaha nya berasal dari dalam negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pelaku usaha nya berasal dari luar negeri.

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi

   Kabupaten Padang Pariaman mengikuti kegiatan promosi yang bertujuan untuk menggaet investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Bagi investor yang telah berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian juga melakukan upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (PMA/PMDN) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

   Melalui program ini telah dilakukan upaya Penyederhanaan Proses Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di Padang Pariaman, sehingga proses perizinan lebih akuntabel, efektif dan efisien. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk

penyusunan draft Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yakni *draft* ranperda IMB, Izin Lokasi, IUJK dan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu.

   Operasional Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang diwujudkan penggunaan aplikasi untuk memberikan pelayanan perizinan. Aplikasi yang digunakan adalah:
   - SiPADU, yang dapat digunakan untuk Layanan Terpadu untuk Publik
   - Sistem Pelayanan (SIMPEL) digunakan untuk mempermudah pengurusan izin.

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Padang Pariaman
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pro investasi, salah satunya pencabutan Izin Gangguan (HO) dan Retribusinya.
3. Meningkatnya kesadarannya perusahaan untuk penyampaian laporan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online maupun Manual.
4. DPMPTP melalui Bidang Penanaman Modal terus berupaya melakukan pembinaan secara intensif kepada perusahaan - perusahaan tentang tata cara pembuatan LKPM secara Online.
5. Untuk meningkatkan investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) membuat terobosan melalui Inovasi pelayanan Antar Jemput Perizinan (AJEP) yaitu pelayanan perizinan dengan cara antar jemput perizinan dengan menggunakan mobil keliling.

Gambar 3.41
Mobil Keliling Program AJEB

- Hambatan dan Masalah
  1. Masih kurangya dana untuk melakukan promosi investasi kabupaten padang pariaman baik tingkat nasional maupun internasional
  2. Masih kurangnya dana untuk melakukan kajian akademis (FS/ PRA FS, Master Plan,) peluang investasi
  3. Masih minimnya Kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha
  4. Kurangnya fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha
  5. Masih kurang diresponnya usulan kegiatan untuk mendukung peningkatan investasi
  6. Masih belum disahkannya revisi RT/RW kabupaten padang pariaman
  7. Masih belum adanya RDTR per kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
  8. Masih Lambatnya respon Dinas Teknis dalam percepatan investasi di Kabupaten Padang Pariaman

- Strategi pemecahan masalah :
  1. Meningkatkan promosi investasi kabupaten padang pariaman baik tingkat nasional maupun internasional
  2. Melakukan kajian akademis (FS/ PRA FS, Master Plan,) peluang investasi
  3. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang kemudahan melakukan pengurusan perizinan berusaha
  4. Meningkatkan fasilitas kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha
  5. Menyusun RDTR per kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
  6. Meningkatkan koordinasi untuk mempercepat respon Dinas Teknis dalam percepatan investasi di Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Misi 5

Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan							
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	8,46	8,53	8,04	105,74	Sangat Berhasil

2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Angka Pengangguran Terbuka	6,65	7,72	6,90	110,62	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	42,88 Juta Rp	45,88 Juta Rp	46,73 Juta Rp	101,85	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS 13

Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 13

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
13.	Angka kemiskinan	persen	8,46	8,53	8,04	105,74	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{\textit{Jumlah Penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\textit{Jumlah Penduduk seluruhnya}} \; x\ 100\%$

Angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 adalah 8,04 persen. Realisasi ini berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 8,53 persen dengan capaian indikator kinerja 105,74 persen dengan kategori "Sangat Berhasil". Angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2017 yang mencapai 8,46 persen.

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial dan P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

DINAS SOSIAL DAN P3A

1. Pemberdayaan fakir miskin, Komunikasi Adat terpencil (KAT) dengan kegiatan :
   - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 17.491 KK. PKH merupakan Program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang memberikan bantuan non

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH akan memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk Jangka Pendek, PKH akan memberikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya.

Gambar 3.42
Penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera

- Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Masyarakat Miskin melalui pemberian bantuan usaha kepada 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jenis bantuan yang diberikan di sesuaikan dengan jenis usaha rintisan yang telah mereka kembangkan selama ini.

Gambar 3.43. Penyerahan Bantuan Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) MEKAR

- Penyaluran dan Monitoring Bantuan Sosial Pangan yaitu Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) : Untuk Tahun 2018 telah disalurkan Beras Sejahtera (RASTRA) kepada 19.615 KK miskin yang masuk ke dalam Basis Data Terpadu.

Gambar 3.44. Penyerahan Beras Sejahtera kepada Keluarga Miskin yang terdata dalam Basis Data Terpadu

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
   - Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
   - Pembinaan Lanjut Usia Terlantar
   - Pelayanan Psikososial bagi PMKAS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana.
   - Pengadaan Bahan Logistik bagi Korban Bencana
3. Program pembinaan anak terlantar, dengan kegiatan Pemulangan dan Penanganan Anak, Orang terlantar sebanyak 4 orang dan Mayat Terlantar Ke Daerah Asal yaitu Kayu Tanam, Jawa, Solo dan Medan dengan memberikan biaya transportasi dan dipastikan kembali ke daerah asal
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan Eks trauma, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma untuk 10 orang dalam bentuk pembuatan sendal hotel
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dengan kegiatan pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan, dengan memberikan bantuan per makanan mencakup beras, sabun mandi, mie, gula, mindyak dan untuk kebutuhan dasar.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan Rehabilitasi Eks Pengguna NAPZA dan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial di Masyarakat berupa penyuluhan bagi pemakai narkoba yang masa tahanan mendekati masa bebas

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
   - Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku dunia usaha kesejahteraan sosial masyarakat berupa penyaluran bantuan ke pelaku-pelaku dunia usaha kesejahteraan sosial masyarakat
   - Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang salah satunya adalah dengan pemberdayaan organisasi Karang Taruna. Untuk kedua kalinya Kabupaten Padang Pariaman menerima Adytia Karya Mahatva Yodha Award sebagai bentuk penghargaan dari Pengurus Nasional Karang Taruna Kepada Kepala Daerah sebagai Pembina Karang Taruna Terbaik atas capaian dalam membangun Kemitraan dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten serta pembinaan dan pemberdayaan di Tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten/Kota. Penghargaan kali ini diserahkan langsung oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial mewakili Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara puncak peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Nasional di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Lampung.

Gambar 3.45. Penyerahan Adytia Karya Mahatva Yodha Award

   - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan sosial, melalui satu LK3 yang memberikan bimbingan konseling bagi keluarga -keluarga yang menghadapi masalah.
   - Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan lainnya di Rawang Kota Pariaman dan Tugu Batang Anai.
   - Forum Komunikasi eks pejuang (PEPABRI, LVRI dan PWRI) dengan Pemda, berupa temu ramah buoati dengan eks pejuang pada setiap tahun tanggal 17 Agustus dan 10 November.

- Bulan Bhakti Karang Taruna, berupa pembangunan rapat beton di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam

8. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yaitu Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 70 rumah.

Gambar 3.46. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
An. Tista Marni

9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan kegiatan : Pembinaan Kabupaten Layak Anak, Pengolahan Data Gender dan Anak dan Sosialisasi PUG dan PPRG
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan :
    - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pembentukan Forum Anak dan memberikan pembekalan dalam hal pengembangan kapasitas Anak.

Gambar 3.47. Pelaksanaan Capacity Building Forum Anak

- Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) berupa penyuluhan ke sekolah sekolah sebanyak 30 sekolah

16. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan : Pembinaan pemberdayaan perempuan, Peningkatan Kapasitas KPPI, Penyuluhan dan pembinaan pemenuhan hak-hak perempuan
17. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
    - Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan sebagai kepala keluarga dalam menembangkan usaha yang dikelola guna peningkatan penghasilan keluarga.

Gambar 3.48. Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan

DINAS KESEHATAN

1. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan Pengembangan JKS Sakato berupa memberikan jaminan kesehatan nasional PBI APBD bagi masyarakat kurang mampu/miskin.

DPMD

1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil mikro dan menengah serta pengembangan produk unggulan pedesaan
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
3. Program Pelaksanaan Program PKK dengan kegiatan pembinaan dasawisma, tabulapot, TOGA, tanaman pekarangan rumah, darmawanita dan organisasi wanita
4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

DINAS KOPERINDAG

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan kegiatan fasilitas pengembangan UKM
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengan dengan kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
3. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan pelaksanaa tera/tera ulang UTTP, monitoring distribusi barang bersubsidi, pelaksanaan pengawasan kemetrologian, pengembangan kemetrologian daerah dan operasional dan pengembangan UPT Metrologi
4. Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan kegiatan membangun jejaring dengan eksportir, koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pembangunan pasar rakyat
6. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima
7. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis masyarakat
8. Program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan peningkatan kesempatan kerja dan bursa kerja online serta pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
9. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial
3. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial.

SASARAN STRATEGIS 14

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 14

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
14.	Angka Pengangguran Terbuka	persen	6,65	7,72	6,90	110,62	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} x\ 100\%$

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 adalah 6,90 persen. Realisasi tingkat pengangguran ini mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 7,72 persen dengan persentase capaian 110,62 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menurunkan angka pengangguran masuk kategori "Sangat Berhasil". Namun capaian tahun 2018 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Adapun tingkat pengangguran pada tahun 2017 adalah 6,65 persen.,

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Padang telah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan angka pengangguran. Kebijakan - kebijakan tersebut direalisasikan dalam bentuk program kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program pengembangan kewirausahaan dankeunggulan kompetitif UKM
5. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif

Pada akhir tahun 2018 jumlah pencari Kerja yang terdaftar sebanyak 3500 orang sedangkan jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan akhir tahun 2018 sebanyak 2.801 orang. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebanyak 31 paket dengan sasaran 496 orang (Sumber data Disdagnakerkop & UKM, 2018).

Tabel.3.23
Pelatihan Yang dilakukan Pada Tahun 2018

NO	PELATIHAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PESERTA
1	Operator menjahit pakaian dasar	BLK Padang Pariaman	16
2	Juru las SMAW 3G	Nagari Padang Kandang Kec. Nan Sabaris	16
3	Mekanik junior sepeda motor	BLK	16
4	Teknisi telepon seluler	BLK Padang Pariaman	16
5	Instalatir penerangan	Nagari Toboh Gadang	16
6	Mekanik yunior mobil	BLK Padang Pariaman	16
7	Juru las SMAW 3G	BLK Padang Pariaman	16
8	Technical Support	BLK Padang Pariaman	16
9	Teknisi AC split	BLK Padang Pariaman	16
10	Operator menjahit pakaian dasar	Nagari Kampung Aneh	16
11	Mekanik junior sepeda motor	BLK Padang Pariaman	16
12	Instalatir penerangan	BLK Padang Pariaman	16
13	Operator basic office	BLK Padang Pariaman	16
14	Audio video	BLK Padang Pariaman	16
15	Processing hasil pertanian	BLK Padang Pariaman	16
16	Juru las SAMW 3G	Nagari Balah Hilia	16
17	Operator menjahit pakaian dasar	Nagari Sungai Buluh Selatan	16
18	Operator menjahit pakaian dasar	Nagari Buayan Lubuk Alung	16
19	Mekanik junior sepeda motor	BLK Padang Pariaman	16
20	Instalasi tenaga	BLK Padang Pariaman	16
21	Las Karbit	BLK Padang Pariaman	16
22	Teknisi telepon seluler	BLK Padang Pariaman	16
23	Processing hasil pertanian	BLK Padang Pariaman	16
24	Operator menjahit pakaian dasar	BLK Padang Pariaman	16
25	Instalatir penerangan	BLK Padang Pariaman	16
26	Operator basic office	BLK Padang Pariaman	16
27	Operator menjahit pakaian dasar	Gedung PKK Padang Pariaman	16
28	Audio video	BLK Padang Pariaman	16
29	Bed cover	BLK Padang Pariaman	16
30	Instalatir penerangan	BLK Padang Pariaman	16
31	Operator mesin furnitur	BLK Padang Pariaman	16

BKOL

Pelatihan Tenaga Kerja

Pelatihan di BLK

Gambar 3.49
Kegiatan pelatihan Yang diadakan BLK

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:
  1. Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat agar siap diterima di dunia kerja.
  2. Adanya bursa tenaga kerja (job fair) serta Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan mengenai rekrutmen calon tenaga kerja yang siap pakai.
  3. Banyaknya kegiatan pembangunan padat karya terutama kegiatan yang bersumber dari dana desa.
  4. Kemudahan dalam pengurusan Kartu Pencari Kerja
  5. Adanya program magang di beberapa perusahaan.
  6. Menyebarkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.
  7. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membuka lapangan kerja baru.

- Hambatan dan Masalah:
  1. Masih kurangnya keterampilan para pencari kerja
  2. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha
  3. Masih tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS
  4. Akibat program moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan oleh Pemerintah pusat dari tahun 2011 hingga 2017.
  5. Banyaknya warga terutama yang berada pada usia pencari kerja yang pindah domisili.

- Strategi pemecahan masalah
  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pelatihan keterampilan.
  2. Menambah jumlah sarana dan prasarana BLK
  3. Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas instruktur
  4. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta/ perusahaan baik dalam maupun luar negeri terkait dengan penyaluran dan rekruitmen tenaga kerja
  5. Meningkatkan pelaksanaan Job Fair
  6. Menggalakkan semangat kewirausahaan pada generasi muda.
  7. Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal.
  8. Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen Kartu Pencari Kerja
  9. Menumbuhkan UMKM baru

SASARAN STRATEGIS 15

Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 15

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
15.	Pendapatan perkapita	Juta Rp	42,88	45,88	46,73	101,85	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : Jumlah pendapatan perkapita dalam rupiah

Pendapatan perkapita merupakan nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan per kapita di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 46,73 juta rupiah. Realisasi ini mampu melebihi target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 45,88 juta rupiah. Adapun capaian kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya termasuk kategori "Sangat Berhasil", dengan persentase capaian 101,85 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan perkapita tahun 2017, Pendapatan perkapita Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 42,88 juta menjadi 46,73.

Perlu dipahami bahwa besaran pendapatan perkapita merefleksikan kemakmuran *(wealth),* daya beli *(purchasing power parity),* dan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Semakin besar Pendapatan perkapita suatu wilayah, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah produksi. Dengan peningkatan Hal ini berarti adanya peningkatan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun.

Berdasarkan peranan PDRB menurut lapangan usaha diketahui 5 sektor lapangan usaha yang mendominasi struktur PDRB pada tahun 2018 adalah :

1. Transportasi dan pergudangan sebesar 33,18 persen,
2. Pertanian, perikanan dan kehutanan 19,43 persen,
3. Industri Pengolahan 10,15 persen,
4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8,31 persen,
5. Kontruksi 7,39 persen

Sementara jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, 5 lapangan usaha yang menunjukan laju pertumbuhan tertinggi adalah sebagai berikut :

1. Jasa Pendidikan 9,42 %
2. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,632 %
3. Konstruksi 7,91 %
4. Transportasi dan Pergudangan 7,85 %
5. Informasi dan Komunikasi 6,95 %

Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Laju Pertumbuhan dan Kontribusi per Sektor Lapangan Usaha Pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,03	19.43
2	Pertambangan dan Penggalian	4,24	5,71
3	Industri Pengolahan	2,71	10,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	4,04	0,04
6	Konstruksi	7,91	7,37
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	4,98	8,31
8	Transportasi dan Pergudangan	7,85	33,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	0,83
10	Informasi dan Komunikasi	6,95	2,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	1,36
12	Real Estat	3,99	0,86
13	Jasa Perusahaan	2,91	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial	4,41	4,06
15	Jasa Pendidikan	9,42	4,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8,62	0,50
17	Jasa Lainnya	6,60	1,19
	Total	**5,59**	**100.00**

Untuk mencapai sasaran strategis 15 ini, Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan program dan kegiatan melalui perangkat daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui program:
   - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan:
     - Peningkatan kemampuan lembaga petani
     - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
     - Pengembangan Kawasan Agribisnis Kakao
     - Pengembangan Produk Olahan Kelapa
     - Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan
   - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), melalui kegiatan:
     - Penanganan daerah rawan pangan
     - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
     - Pengembangan lumbung pangan desa
     - Pengembangan perbenihan/pembibitan
     - Penyuluhan sumber pangan alternatif
     - Pengembangan Usaha Pertanian Melalui Peningkatan Produktifitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP2)
     - Pemanfaatan Lahan Terlantar Melalui Optimalisasi Lahan (OPL)
     - Pengembangan Usaha Pertanian Melalui Peningkatan Produktivitas Lahan dan Air (Pendamping Paralel WISMP2)
     - Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air
     - Pengadaan Alsintan
   - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
     - Pembinaan Usaha Pertanian Organik
     - Penunjang Pasca Panen dan Pemasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
   - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
     - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
   - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan:
     - Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
     - Pengembangan Tanaman Hortikultura
     - Pengembangan Tanaman Perkebunan

- Peningkatan Produktivitas Produksi Pertanian
- Operasional Brigade Tanam
- Pengembangan Tanaman Jambu Biji Merah
- Peningkatan Produksi Kakao Melalui Intensifikasi
- Pengembangan Rehabilitasi Kelapa
- Perlindungan dan Pengendalian HPT Tanaman Pangan

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program:
   - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, melalui kegiatan:
     - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
     - Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
     - Pelayanan Kesehatan hewan
     - Uji bahan pangan asal hewan
   - Program peningkatan produksi hasil peternakan, melalui kegiatan:
     - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
     - Pelayanan Inseminasi Buatan
     - Peningkatan Pemanfaatan Pakan Lokal
     - Pengembangan Sapi pada Kawasan Terpadu
     - Pengembangan Kawasan HMT dan Sapi
   - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, melalui kegiatan:
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
     - Bulan Bhakti Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM melalui program:
   - Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
   - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
   - Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui kegiatan:
     - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
   - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, melalui kegiatan :
     - Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM
   - Program peningkatan dan pengembangan ekspor, melalui kegiatan:
     - Membangun jejaring dengan eksportir
   - Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan:
     - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
     - Pengembangan pasar lelang daerah

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Pembangunan Pasar Nagari (DAK)
- Promosi Hasil Produk Daerah
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar
- Pembangunan Pasar Nagari (APBD)

4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, melalui program:
   - Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
     - Penjajakan Investasi dan Promosi
     - Penyusunan Buku Potensi dan Data Investasi
     - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
   - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, melalui kegiatan:
     - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
   - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, melalui kegiatan:
     - Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
     - Pengadaan Buku Pedoman dan Papan informasi Pelayanan Perizinan
     - Operasional Peningkatan Pendapatan Daerah
     - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan
   - Program pengembangan industri kecil dan menengah, melalui kegiatan:
     - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
     - Peningkatan dan pengembangan mutu produk industri kecil daerah serta pengawasan pembinaan IKM
     - Lanjutan Pengembangan Industri Cokelat
   - Program peningkatan kemampuan teknologi industri, melalui kegiatan:
     - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
     - Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur.
   - Program Penataan Struktur Industri, melalui kegiatan:
     - Pengembangan Potensi Kawasan Industri

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Program pembangunan jalan dan jembatan, melalui kegiatan:
     - Pembangunan jalan
     - Pembangunan jembatan
     - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, melalui kegiatan:
  - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
  - Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)
  - Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP)
  - Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP 2 Hibah)
- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan:
  - Pembangunan/peningkatan infrastruktur
- Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:
  - Penyusunan Revisi RTRW
  - Penyusunan RDTR dan KLHS

6. Dinas Perhubungan
   - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, melalui kegiatan:
     - Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
     - Pendataan dan Pemberian Izin Berlayar pada Kapal dibawah 7 GT
   - Program peningkatan pelayanan angkutan, melalui kegiatan:
     - Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
     - Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan jalan
     - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
     - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, melalui kegiatan:
     - Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
   - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, melalui kegiatan:
     - Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Nagari /Pokja Kredit Mikro
     - Fasilitasi BUMNag dan Kelembagaan Pasar Nagari
   - Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, melalui kegiatan:
     - Evaluasi Perkembangan Nagari
     - Operasional Program TMMD
     - BBGRM

- Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, melalui kegiatan:
  - Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
   - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, melalui kegiatan:
     - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
     - Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata
     - Atraksi Pariwisata
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
     - Pelaksanaan Event Pacu Kuda
   - Program pengembangan destinasi pariwisata, melalui kegiatan:
     - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
     - Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
     - Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
     - Pelaksanaan Event Pasie Maelo
     - Penyusunan Master Plan Pariwisata
     - Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Fisik)
     - Amenitas Pariwisata (DAK Fisik)

9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan:
   - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan:
     - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
     - Pendataan PBB
     - Operasional Pemungutan PAD
     - Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10. Dinas Perikanan
    - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, melalui kegiatan:
      - Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir
      - Pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR)
    - Program pengembangan budidaya perikanan, melalui kegiatan:
      - Pembinaan dan pendampingan Pada POKDAKAN/UPR
      - Gerakan Induk Ikan Unggul (Gaul)
      - Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari)
      - Pengembangan Kawasan Minapolitan

- Pengembangan Wirausaha perikanan
- Optimalisasi Pemanfaatan Kolam Terlantar
- Restocking Benih Ikan Perairan Umum

- Program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan:
  - Pembinaan Kelompok Nelayan Kecil
  - Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Perikanan Tangkap
  - Pelatihan Teknologi Mesin Kapal Penangkapan Ikan
- Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dengan kegiatan:
  - Pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan
  - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, melalui kegiatan:
  - Pengembangan kawasan sentra perbenihan ikan gurami
  - Pengembangan Kawasan Budidaya air payau
  - Pengembangan Kawasan budidaya air tawar

❖ Faktor yang mempengaruhi keberhasilan:

1. Adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah mewujudkan pembangunan dengan tidak hanya bergantung dari anggaran pembangunan daerah (APBD Kabupaten) namun juga melakukan upaya untuk terus menggaet dana-dana pembangunan diluar APBD Kabupaten Padang Pariaman seperti dana APBN, APBD Provinsi maupun dana lainnya yang bertujuan untuk pengembangan daerah Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhannya.

2. Adanya Bandara Internasional Minangkabau yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaI tempat arus keluar masuknya orang, barang dan jasa yang jika dikelola dan diberdayakan secara optimal akan mendukung upaya peningkatan PDRB Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan

Gambar 3.50
Bandara Internasional Minangkabau

3. Proyek-proyek strategis nasional dan daerah yang dilaksanakan di daerah ikut mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah/masyarakat seperti asrama haji, pembangunan gedung perkantoran, pasar rakyat, dll.

Gambar 3.51
Pembangunan Asrama Haji

4. Adanya kawasan Industri di Kabupaten Padang Pariaman. Diharapkan dengan memberikan kemudahan berusaha di Kawasan Industri akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Gambar 3.52
Pabrik "Coco Mas" sebagai salah satu industri pengolahan makanan yang ada di Padang Pariaman

5. Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu di Daerah Tarok Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.53
Rencana Kawasan Pendidikan Tarok

6. Pengembangan pengolahan coklat yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Padang Pariaman untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemasaran hasil olahan tersebut di pusatkan kawasan Anai Resort Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

❖ Hambatan dan Masalah **:**

1. Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor ikut mempengaruhi terhambatnya pembangunan sektor ekonomi daerah dan minat investor dari luar untuk melakukan investasi
2. Permasalahan dan status tanah adat yang ikut mempengaruhi terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sektor ekonomi
3. Penyakit masyarakat yang berkembang seperti peredaran narkoba akan mempengaruhi kualitas SDM generasi muda

❖ Strategi Pemecahan Masalah :

Pemerintah daerah untuk tahun mendatangnya diharapkan untuk lebih mengelola sumber ekonomi lokal yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah yang ditandai dengan peningkatan PDRB riil per kapita melalui :

1. Menciptakan dan perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru
2. Peningkatan sektor-sektor lapangan usaha dan produksi masyarakat
3. Penumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi produktif lokal melalui upaya pengembangan produk unggulan daerah, kecamatan dan nagari secara terpadu dan berkelanjutan

4. Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat
5. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui jaminan fasilitasi penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah
6. Pengembangan SDM masyarakat dalam upaya pengembangan usaha produktif masyarakat
7. Upaya pengembangan kerja sama dengan pihak investor dari luar
8. Upaya peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan
9. Sinergitas program dan kegiatan antar SKPD terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.

SASARAN STRATEGIS 16

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Misi 6

Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik							
Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	100%	Sangat Berhasil
		Nilai LPPD	2,94	3,25	3,12	96%	Sangat Berhasil
Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas							
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima, Aspiratif Dan Partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	73,82	76,61	76,20	99,46	Sangat Berhasil

1. Opini Laporan Keuangan

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
16.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Berhasil

Pengukuran capaian indikatyor ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Opini Laporan Keuangan:
Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah

Untuk capaian indikator ini didukung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman serta OPD terkait. Adapun capaian kinerja terhadap Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pada tahun 2018, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni. Hal ini berarti Padang Pariaman dinilai telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib administrasi yang transparan dan akuntabel. Pencapaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai capaian indikator Opini BPK ini adalah 100% dengan kategori "Sangat Berhasil". Keberhasilan capaian tahun 2018 ini mampu mempertahankan capaian tahun 2017. Semenjak tahun 2008, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah diterima Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 6 (lima) kali yaitu: tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Opini Laporan Keuangan dari BPK merupakan bentuk penilaian kualitatif terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hasil dari setiap Opini BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terdiri dari 4 (empat) penilaian, yaitu Tidak Menyatakan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Skor dari masing-masing opini tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.28
Skor Hasil Opini BPK

No	Jenis Opini BPK	Skor
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
2	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	3
3	Tidak Wajar	2
4	Tidak Menyatakan Pendapat	1

Untuk mencapai Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka dilaksanakan program dan kegiatan:

Tabel 3.29
Program dan Kegiatan Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Program	Kegiatan
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.	Program Peningkatan dan PengembangPengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi
		Klinik akuntansi/asitensi penyusunan laporan keuangan SKPD
		Penunjangan Sistem imformasi keuangan daerah (SIMDA)
		Pembinaan pengelolaan keuangan daerah
		Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPK bendahara
		Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah
		Persiapan pelaksanaan penganggaran e-budgeting
		Penyusunan standar biaya dan buku petunjuk teknis pelaksanaan APBD
		Penyusunan laporan aset/ barang daerah
		Implementasi simda bmd
		Penghapusan dan pelelangan BMD
		Kodefikasi dan Pencekingan Aset
		Implementasi aplikasi persediaan
		Penatausahaan kas daerah
		Verifikasi piutang PBB
		Operasional pendataan pajak dan retribusi
		Sosialisasi PBB dan BPHTB
		Sosialisasi cukai tembakau
		Operasional pemungutan PAD

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini karena:

1. Komitmen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) untuk mempertahankan opini WTP sebagai bentuk pengakuan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Gambar 3.54
Bupati Padang Pariaman menyerahkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat

2. Komitmen dari seluruh stakeholder terkait (OPD) untut pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Pelaksanaan pencapaian indikator sasaran yang *diback up* dengan penyusunan peraturan-peraturan berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis.
4. Penerapan tekhnologi informasi yang *up date*, seperti penggunaan aplikasi simda keuangan, simda gaji, simda pendapatan, simda BMD, aplikasi persediaan, aplikasi e-budgeting yang bisa diakses secara on line.
5. Peningkatan kualitas SDM yang ada, seperti pelayanan pada klinik akuntansi, rekon laporan keuangan dan asset, sosialisasi dan bimtek guna meningkatkan pemahaman atau pengetahuan dalam melaksanakan tugas secara tertib, efektif, efisien, dan taat pada aturan yang berlaku.

Gambar 3.55
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD dan PPK Bendahara

Gambar 3.56
Penghapusan Aset BPBD bersama Bidang Aset BPKD terkait Pengelolaan dan Pengaruhnya terhadap Pelaporan_BMD

6. Pendampingan Tim Review Inspektorat terhadap penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemda.
7. Tim review Inspektorat melaksanakan review terhadap Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hasil dari review sebagai bahan perbaikan dalam penyajian Laporan Keuangan.

Tujuan dilaksanakannya review atas laporan keuangan adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Pada Tahun 2018, tim inspektorat daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan review terhadap:

1. Laporan keuangan SKPD Tahun 2018 yang terdiri dari 26 SKPD dan 17 Kecamatan, serta
2. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.

Selain melakukan review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah juga dilakukan pendampingan terhadap tim BPK-RI yang melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.

Gambar 3.57
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan OPD

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Tabel 3.30 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
17.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	B	B	100	Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan & RB, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 adalah "B". Penilaian ini menunjukan bahwa tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil telah menunjukan hasil yang baik. Perolehan nilai SAKIP 2018 berhasil mencapai target "B" yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian nilai ini juga sama dengan capaian nilai SAKIP Tahun 2017 yaitu "B". Namun jika dilihat dari perolehan poin, nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 60,13 ada tahun 2017 menjadi 65,80 pada tahun 2018 sebagaimana dilihat pada tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.31
Aspek Evaluasi SAKIP

NO	ASPEK YANG DIEVALUASI	NILAI MAKSIMAL	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	17,49	19,81	21,53
2	Pengukuran Kinerja	25	8,13	15,32	16,46
3	Pelaporan Kinerja	15	7,27	9,15	10,90
4	Evaluasi Internal	10	4.79	4,96	5,89
5	Capaian Kinerja	20	12,35	10,89	11,01
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,03	60,13	65,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	B

Keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan merupakan hasil upaya yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

1. Program: Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Kegiatan :
   a) Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
   b) Evaluasi LAKIP SKPD

❖ Faktor yang mendukung keberhasilan:
1. Komitmen Kepala Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Komitmen yang tinggi dari seluruh OPD dalam pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD dengan Bupati Padang Pariaman dan mendukung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.
3. Adanya workshop bagi seluruh Kepala OPD dan teknis terkait agar memahami SAKIP secara keseluruhan dengan narasumber yang berasal dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Inspektorat Daerah.
4. Adanya *cascading* kinerja OPD guna memastikan tercapainya berbagai tujuan yang telah dituangkan dalam RPJMD
5. Melakukan keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran strategis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efesien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Gambar 3.58
Pelaksanaan *cascading* kinerja OPD

6. Rapat-rapat internal dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat dan seluruh OPD dalam rangka

penyamaan persepsi untuk dalam menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja daerah.

7. Seluruh Kepala OPD mampu menerapkan pelaksanaan SAKIP yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
8. Dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
9. Adanya Tim Review dari Inspektorat yang bertugas melakukan pendampingan terhadap OPD sampel dalam penyusunan cascading dan kelengkapan bahan evaluasi SAKIP lainnya. Tim review juga bertugas untuk mereview LAKIP OPD serta melakukan pendampingan terhadap Kasubag perencanaan OPD dalam menyusun LAKIP OPD-nya. Selain itu Tim juga melakukan review terhadap LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018. Tujuan dilaksanakan review atas LAKIP adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan, data/informasi kinerja Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.
10. Melakukan *coaching clinic* penyusunan dokumen LAKIP untuk seluruh OPD dengan narasumber dari Kemenpan RB

Gambar 3.59
Coaching clinic SAKIP 2018

Gambar 3.60. Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan:
Penghargaan
Kepada:
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
atas prestasinya dalam:
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
dengan Predikat Nilai
B
Jakarta, 31 Desember 2018
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Drs. Syafruddin, M.Si.

Gambar 3.61
Piagam Penghargaan Atas Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

❖ Hambatan dalam pencapaian

Meskipun nilai SAKIP telah melampau target yang telah ditetapkan namun ada beberapa hal hambatan dalam pencapaian ini antara lain :

1. Perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra OPD belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja outcome yang diharapkan akan dicapai. Beberapa sasaran strategis masih menunjukan proses ataupun output yang akan dicapai.
2. Belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriteria kualitas yang baik, terutama terkait dengan keterukuran (*measurable)* dan relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur serta orientasi pada hasil (*outcomes)*
3. Meskipun telah melakukan cascade down kinerja, namun hasil cascade down perlu ditinjau ulang guna memastikan adanya keselarasan dalam ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
4. Belum seluruh program dan kegiatan berkorelasi langsung terhadap capaian sasaran strategis. Masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak selaras dengan capaian sasaran strategis
5. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
6. Evaluasi program belum dilakukan.
7. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja tidak berjalan optimal. Informasi kinerja belum efektif dalam memicu berbagai perbaikan yang diperlukan
8. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu memicu perbaikan akuntabilitas kinerja OPD

❖ Strategi Pemecahan Masalah

1. Melakukan review menyeluruh terhadap dokumen perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (integrated development plan) serta mekanisme *cascade* kinerja.
2. Melakukan *Cascade down* kinerja sampai level terbawah guna memastikan tercapainya berbagai tujuan yang telah dituangkan dalam RPJMD.
3. Melakukan review atas keselarasan antara kegiatan, program dan sasaran startegis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efesien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas OPD.
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas OPD.
6. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Penguatan budaya kerja ditunjang dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja

3. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 16

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
18.	Nilai LPPD	Angka	2,94	3,25	3,12	96	Sangat Berhasil

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan Formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran Nilai LPPD :
Hasil terhadap laporan LPPD

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai LPPD dengan skor 3,12 dengan status kinerja sangat tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada pada rangking ke 121 dari 397 Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini

belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu skor 3,25 namun tetap termasuk kategori berhasil dengan persentase capaian 96 persen. Pencapaian tahun 2018 juga lebih baik dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 skor nilai LPPD yang diraih 2,94 dengan status tinggi, dan peringkat 168 dari 384 Kabupaten se- Indonesia.

Program dan kegiatan yang mendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD.

❖ Faktor yang mendukung keberhasilan:

1. Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan pemerintah pusat.
2. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat dan memadai untuk menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.
3. Pelaksanaan dan pengendalian serta fungsi-fungsi pengawasan.
4. Adanya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target-target indikator kinerja.
5. Adanya tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten untuk perbaikan kinerja berikutnya.
6. Pelaksanaan workshop penyusunan LPPD untuk meningkatkan kualitas SDM.

Gambar 3.62
Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018

❖ Hambatan dan masalah

1. Masih adanya perangkat daerah yang belum memiliki program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai target indikator kinerja masing-masing perangkat daerah.
2. Adanya beberapa indikator yang belum mencapai nilai yang diharapkan.

3. Kurangnya motivasi personil yang membidangi pelaporan untuk menyusun laporan kinerja pada masing-masing perangkat daerah.

❖ Strategi Pemecahan Masalah :

1. Menyusun perencanaan dengan baik untuk mencapai target indikator kinerja.
2. Membangun sistem pendataan yang baik untuk pendokumentasian data dukung setiap klaim capaian kinerja IKK.
3. Melakukan kegiatan pra evaluasi oleh tim mandiri
4. Meningkatkan kompetensi SDM perencanaan dan pelaporan

SASARAN STRATEGIS 17

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima, Aspiratif dan Partisipatif

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis 17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Relisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
19.	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	Nilai	73,82	76,61	76,20	99,46	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : $\frac{\textit{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\textit{Total unsur yang terisi}} \textit{x Nilai penimbang}$

Hasil survei pada tahun 2018 menunjukkan Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD terhadap kualitas pelayanan publik berada pada angka 76,20. Nilai ini meningkat sebanyak 2,38 poin, dibandingkan dengan Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD tahun 2017 yaitu 73,82. Keberhasilan ini menandakan kuatnya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD merupakan indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai tersebut didapat dengan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap 6 OPD sampel yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada 6 unit pelayanan, berdasarkan persepsi Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD pada masing-masing unit pelayanan yang disurvey dapat dilihat pada tabel 3.32 sebagai berikut :

Tabel 3.34
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan OPD

No	Unit Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	KinarjaUnit Pelayanan
1	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	83,01	B	Baik
2	RSUD Kabupaten Padang Pariaman	76,97	B	Baik
3	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian	77,24	B	Baik
4	BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman	76,69	B	Baik
5	PDAM Kabupaten Padang Pariaman	70,22	C	Kurang Baik
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73,07	C	Kurang Baik
	Rata-rata	**76,20**		**Kurang Baik**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 6 OPD yang dilakukan survey IKM, 4 OPD memperoleh nilai B dan 2 OPD memperoleh nilai C. Namun jika dibandingkan dengan capaian nilai tahun 2017 terjadi peningkatan pada tahun 2018 seperti data tabel 3.33.

Tabel 3.35
Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 2017-2018

NO	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2017		2018	
		Permenpan RB 14/2017		Permenpan RB 14/2017	
		Mutu Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Nilai IKM
1	DISDUKCAPIL	B	82.02	B	83,01
2	DPMPTP	C	72.90	B	77,24
3	BKPSDM	C	70.61	B	76,69
4	RSUD	C	75.15	B	76,97
5	PDAM	C	68.39	C	70,22

Tabel 3.36
Nilai Mutu Pelayanan berdasarkan Permenpan RB

Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017				
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Gambar 3.63
Survey Kepuasana Masyarakat Yang Dilaksanakan di Disducapil

Gambar 3.64
Survey Kepuasana Masyarakat Yang Dilaksanakan di RSUD Padang Pariaman

Gambar 3.65
Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilaksanakan di DPMPTP

❖ Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan :

1. Peningkatan pemahaman Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dalam menerapkan Permen PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Satndar Pelayanan Publik (SPP).
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja.

SASARAN STRATEGIS 18

Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Misi 7

Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana							
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana							
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Masyarakat Tangguh Bencana	Nagari Tangguh Bencana	-	2 nagari	2 nagari	100%	Sangat Berhasil

Formulasi Pengukuran : Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Dari tabel dibawah terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman telah dapat meraih target 2 Nagari tengguh bencana yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kategori capaiannya dapat dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Nagari Tangguh Bencana adalah nagari yang sudah mempunyai perencanaan terhadap penggurangan resiko bencana, penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana. Adapun tahapan nagari tangguh bencana telah mempunyai :

- Rencana Penggurangan Resiko Bencana (RPB)
- Mempunyai Peta Rawan Bencana
- Sudah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB)
- Sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pada Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana terdapat Kegiatan Pembentukan Nagari Tangguh Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memiliki 2 (dua) Nagari Tangguh Bencana, 2 Nagari tersebut adalah Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai dan Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan nagari tangguh bencana diantaranya :

1. BPBD telah melaksanakan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang dilaksanakan setiap tanggal 26 April setiap tahunnya, adapun kegiatannya berupa pelaksanaan simulasi mandiri oleh seluruh OPD dan Kecamatan serta Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar masing-masing OPD yang telah melaksanakan simulasi diharapkan dapat memberikan dan menyebarluaskan ke pada masyarakat untuk kesiapsiagaan penggurangan resiko bencana.
2. Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk Kelompok Siaga bencana (KSB) yang mana Kelompok -kelompk KSB tersebut adalah bagian dari BPBD dan KSB tersebut yang membantu BPBD dalam penanggulangan bencana. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman telah terbentuk KSB sebanyak 356 KSB dan yang masih aktif hanya 36 KSB.
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Mitigasi Bencana di Sekolah-sekolah yang berada dipesisir pantai. Dengan adanya Kegiatan Sosialisasi dan Mitigasi Bencana maka dapat membantu terbentuknya nagari atau daerah yang tangguh bencana.
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencana bersama camat dan wali nagari di 17 Kecamatan

Gambar 3.66
Sosialisasi dan koordinasi tentang penanggulangan kebencanan bersama camat dan wali nagari

❖ Hambatan dalam pencapaian kinerja

1. Pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana sangat kurang
2. Peran serta aktif masyarakat terhadap nagari tangguh bencana sangat rendah sehingga sulit untuk kegiatan sosialisasi dan kesiapsiagaan

❖ Strategi penyelesaian permasalahan:

1. Penyusunan Regulasi Renacana Penggurangan Resiko Bencana (RPB) dan Kawasan Resiko Bencana (Peta Rawan bencana) untuk seluruh nagari.
2. Melakukan sosilisasi dan koordinasi bersama camat dan nagari untuk mengaktifkan kembali KSB yang tidak aktif dan membentuk bagi nagari yang belum mempunyai kelompok siaga bencana (KSB)
3. BPBD melakukan sosilisasi dan simulasi terhadap sekolah yang berada di sepanjang pesisr pantai padang pariaman diperkirakan sebnayak 20 sekolah
4. Melaksanakan HKB yang dilaksanakan setiap tanggal 26 April setiap tahunnya akan dilaksanakan diseluruh nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Untuk Tahun 2020 BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah Mengusulkan 2 Nagari melalui kegiatan BPBD Propinsi Sumatera Barat, adapun usulan nagari tersebut adalah Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan.

PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018

ANUGERAH MEDIA HUMAS KATEGORI SIARAN PERS PEMBERITAAN

PENGHARGAAN EVALUASI AKIP DENGAN NILAI B

IGA (Innovative Government Award 2018)

DWIJA PRAJA NUGRAHA

KEPATUHAN TINGGI (OMBUDSMAN)

PENGHARGAAN DARI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMBAR

PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM

PENGHARGAAN PELAYANAN PUBLIK

PENGHARGAAN WTP

ADYTIA KARYA MAHATVA YODHA AWARD

PENGHARGAAN PROKLIM DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGHARGAAN APRESIASI PEMBINAAN PROKLIM

PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA

PENGHARGAAN LOMBA BERCERITA SISWA SD/MI TINGKAT NASIONAL

PEDULI WISATA AWARD

C AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel 3.38 Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018			
Uraian	**Pagu**	**Realisasi**	**Capaian**
Pendapatan Daerah	Rp. 1.466.361.930.430,30	Rp. 1.392.534.033.373,02	94,97%
Belanja Daerah	Rp. 1.316.014.029.655,46	Rp. 1.242.966.474.669,33	94,45%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.466.361.930.430,30 dan realisasi sebesar Rp. 1.392.534.033.373,02 (94,97%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 108.003.148.549,30	Rp. 84.472.667.291,02	78,21%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.208.369.248.283,00	Rp. 1.160.139.707.914,00	96,01%
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 149.989.533.598,00	Rp. 147.921.658.168,00	98,62%

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah , dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 108.003.148.549,30 dan realisasi sebesar Rp. 84.472.667.291,02 (78,21%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2018

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 41.575.000.000	Rp. 41.412.253.897	99,61%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 4.715.010.000	Rp. 2.843.854.157	60,31%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.791.014.751	Rp. 5.791.014.751	100%
4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 55.922.123.798,3	Rp. 34.425.544.486,02	61,56%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**Rp. 108.003.148.549,3**	**Rp. 84.472.667.291,02**	**78,21%**

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya , Bantuan Keuangan pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.208.369.248.283 dan realisasi sebesar Rp. 1.160.139.707.914 (96,01%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.41 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2018

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	Rp. 1.111.120.813.471	Rp. 1.087.008.037.363	97,83%
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (Dana Penyesuaian)	Rp. 16.500.000.000	Rp. 16.500.000.000	100%
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	Rp. 80.748.434.812	Rp. 56.631.670.551	70,13%
Jumlah Pendapatan Transfer		**Rp. 1.208.369.248.283**	**Rp. 1.160.139.707.914**	**96,01%**

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Pendapatan Lainnya, Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 149.989.533.598 dan realisasi sebesar Rp. 147.921.658.168 (98,62%).

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.42
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2018

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	Rp. 67.690.134.410	Rp. 65.888.199.168	97,34%
2	Pendapatan Lainnya	Rp. 491.555.188	Rp. 225.615.000	45,90%
3	Dana Bantuan Pemerintah/Dana Alokasi Desa	Rp. 81.807.844.000	Rp. 81.807.844.000	100%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		**Rp. 149.989.533.598**	**Rp. 147.921.658.168**	**98,62%**

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 18 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.43
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kinerja		Pagu	Anggaran	
				Realisasi	%		Realisasi	%
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah Tujuan : Peningkatan Pengamalan Agama								
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	70%	70%	100	Rp 1,356,580,000	Rp 1,354,400,619	99.84
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Sektor Primer dan Jasa								
2	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.492.026,50	Rp. 3.731.537,4	149.74	Rp 1,014,113,168	Rp 987,432,668	97.37
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	95.69	95.13	99.41	Rp 10,309,564,668	Rp 10,230,601,390	99.23
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas Dan Terampil Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dan Kualitas Tenaga Pendidik Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan								
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60 tahun	13,56 tahun	99.71	Rp 90,855,793,450	Rp 29,397,794,223	32.36
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	43%	80.34%	186.84	Rp 365,678,000	Rp 355,902,673	97.33
Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan								
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,87 tahun	67,96 tahun	97.27	Rp 31,892,365,800	Rp 27,154,817,867	85.15
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Tujuan 1 : Terwujudnya Padang Pariaman Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama								
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	60.000 orang	183.600 orang	306	Rp 4,663,049,168	Rp 4,240,828,138	90.95
Tujuan 2 : Terwujudnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas								

8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	61%	46.98%	77.01	Rp	171,118,692,760	Rp	148,044,549,396	86.52
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	46,3	47.12	101.77	Rp	16,571,449,500	Rp	12,203,256,002	73.64
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	78%	75%	96.15	Rp	20,502,449,400	Rp	18,573,898,351	90.59
Tujuan 3 : Terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan										
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8	7	87.5	Rp	25,167,692,900	Rp	18,242,387,291	72.48
Tujuan 4 : Meningkatnya Jumlah Investasi										
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	55	69	125.45	Rp	767,251,000	Rp	761,815,438	99.29
Misi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengentasan Kemiskinan Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin										
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8.53%	8.04%	105.74	Rp	1,434,801,000	Rp	1,432,557,400	99.84
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7.72	6.90	110.62	Rp	104,952,000	Rp	104,878,050	99.93
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	45,8813 Juta Rp	46,73 Juta Rp	101.85	Rp	10,986,905,692	Rp	10,712,555,596	97.50
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel										
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100	Rp	45,300,000	Rp	45,298,000	99.996
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	B	B	100	Rp	335,320,000	Rp	329,983,038	98.41

		Nilai LPPD	3.25	3.12	96	Rp	162,623,875	Rp	160,371,197	98.61
Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas										
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	76.61	76.20	99.46	Rp	375,600,000	Rp	369,371,047	98.34
Misi 7 : Mewujudkan Ketahanan Bencana Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Kesiapan Sarana Dan Prasarana Yang Ramah Bencana										
Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Bencana										
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari	2 nagari	100	Rp	7,855,131,980	Rp	7,739,194,750	98.52

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperlihatkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan/ dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2018. Dari 20 Indikator Kinerja Utama tersebut, 17 Indikator dikategorikan **sangat berhasil**, dan 3 indikator dikategorikan **berhasil.**

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B RENCANA PERBAIKAN KEDEPAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya hambatan – hambatan dan kendala. Keberhasilan yang diperoleh merupakan perwujudan dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal dan sebaliknya ketidakberhasilan terhadap target capaian berarti masih kurang mampu mengatasi hambatan dan kendala. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2018 menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan

jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja, telah teridentifikasi hambatan dan masalah yang ditemukan dalam pencapaian pada masing-masing sasaran kinerja serta rumusan strategi pemecahan masalah pada masa yang akan datang dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana yang dijelaskan pada matrik berikut:

Matrik 4.1:
Masalah dan Strateginya

Hambatan dan Masalah	Strategi Pemecahan Masalah
• Belum optimalnya peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama • Efek negatif kemajuan informasi dan teknologi yang memberikan akses tanpa batas pada masyarakat • Masih maraknya penyakit masyarakat • Masih rentannya karakter masyarakat terutama generasi muda dipengaruhi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya seperti LGBT, narkoba, pergaulan bebas.	• Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama. • Peningkatan fungsi dan peran lembaga adat • Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah terkait penyakit masyarakat. • Pengembangan dan pelestarian budaya daerah
• Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. • Masih tingginya serangan hama yang beresiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian • Masih ada masyarakat tani yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi budidaya tani. • Masih kurangnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan • Daya saing produk pertanian yang	• Penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mencegah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi • Penanganan hama secara menyeluruh yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (Flame Blower). • Peningkatan penggunaan bibit

masih rendah • Masih ditemukannya penyakit hewan ternak masyarakat	unggul bersertifikasi yang tahan hama • Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian. • Pemberian bantuan/pinjaman alat pertanian melalui kegiatan Operasional Brigade Tanam. • Peningkatan penerapan teknologi pertanian • Peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan • Peningkatan vaksinasi hewan ternak gratis
• Faktor Kemiskinan yang mempengaruhi angka putus sekolah • Kawasan permukiman yang berjauhan dari sarana pendidikan terutama pada wilayah dengan yang berbukit dan terjal. • Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya "marantau", ikut saudara berdagang ke daerah lain. • Ketimpangan distribusi guru • Belum optimalnya kualitas dan kwantitas pelayanan kesehatan dasar serta pemerataan penyebaran tenaga kesehatan yang dimiliki di puskesmas. • Belum optimalnya promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat. • Upaya peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jamkesmas dan Jamkesda di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah masih terkendala dengan sumber pendanaan dan kebijakan daerah	• Peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin berupa pemberian bantuan beasiswa • Perbaikan infrastruktur untuk peningkatan akses menuju sekolah • Pengoptimalan program wajib belajar sembilan tahun • Penataan penampatan guru • Peningkatkan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan anggaran operasional sekolah. • Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan • Peningkatan promosi kesehatan yang dilakukan dalam merubah perilaku hidup sehat pada masyarakat. • Peningkatan cakupan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu melalui Jamkesmas dan Jamkesda di puskesmas dan rumah sakit pemerintah daerah

• Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor ikut mempengaruhi terhambatnya pembangunan sektor ekonomi daerah dan minat investor dari luar untuk melakukan investasi • Permasalahan dan status tanah adat yang ikut mempengaruhi terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sektor ekonomi • Penyakit masyarakat yang berkembang seperti peredaran narkoba akan mempengaruhi kualitas SDM generasi muda	• Menciptakan dan perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru • Peningkatan sektor-sektor lapangan usaha dan produksi masyarakat • Penumbuhan dan pengembanagan sektor ekonomi produktif lokal melalui upaya pengembangan produk unggulan daerah, kecamatan dan nagari secara terpadu dan berkelanjutan • Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat • Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui jaminan fasilitasi penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah • Pengembangan SDM masyarakat dalam upaya pengembangan usaha produktif masyarakat • Upaya pengembangan kerjasama dengan pihak investor dari luar • Upaya peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan • Sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.
• Seringnya bencana alam mengakibatkan kerusakan pada infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi • Adanya kegiatan tahun 2018 hampir 80% pekerjaan aspirasi (Pokir DPRD) dan sebahagian besar pekerjaan tersebut yang ditangani adalah jalan status non Kabupaten, sehingga kenaikan persentase jalan Kabupaten pertumbuhan mantapnya kecil. Beberapa ruang jalan yang	• Peningkatan sumber dana pembangunan di luar APBD • Melakukan pengaggaran sesuai dengan kondisi real dilapangan. • Peningkatan mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, dengan mempergunakan bahan yang baik walaupun dibenturkan oleh hal biaya yang ada, karena nilai dari suatu proyek ialah kesesuaian dengan metode teknis yang telah direncakan.

telah habis umur rencana yang dominan rusak ringan dan rusak berat telah diusulkan oleh Dinas PUPR tidak terlaksana karena defisit anggaran. • Saluran drainase yang kurang baik dan belum optimal di sepanjang jalan. • Belum optimalnya fungsi pengawasan akibat kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan fungsi tersebut sehinga pemeliharaan jalan pun belum optimal.	• Mengoptimalkan pemeliharaan jalan melalui saluran drainase yang baik di pinggir jalan karena sistem pembuangan air yang kurang baik akan semakin cepat merusak jalan tersebut. • Optimalisasi dalam perencanaan teknis pembangunan jalan, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut. • Peningkatan pengawasan melalui penambahan kuantitas pegawai di Dinas Pekerjaan Umum sehingga fungsi pengawasan dapat dioptimalkan dan meminimalisir ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
• Masih tingginya tingkat pengangguran • Pendaftar pencari kerja kurang sehingga sedikit yang mengurus dokumen AK 1 (kartu kuning) ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. • Masih kurangnya kompetensi dan keterampilan masyarakat	• Menambah jenis-jenis pelatihan. • Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan beserta kualitas instruktur. • Peningkatan kerja sama dengan perusahaan • Penumbuhkembangan UMKM baik UMKM baru maupun yang telah ada. • Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal. • Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen AK 1 • Peningkatan Job Fair secara berkala • Peningkatan program padat karya
• Hasil Evaluasi SAKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pertimbangan atau feedback dalam perncanaan anggaran dan pembangunan tahun berikutnya. • Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan SAKIP sehingga dalam memproses/menginput data masih mengalami hambatan-hambatan tidak tersedianya data dan informasi	• Pendampingan penyusunan dokumen-dokumen terkait SAKIP oleh Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi. • Mengikuti Coaching Clinic tentang SAKIP dengan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.

yang dibutuhkan.	• Pendampingan intensif oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman selama proses penyusunan dokumen-dokumen terkait SAKIP sebelum melaksanakan Reviu.
• Masih ada ASN yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. • Masih ada Kelemahan dalam penyediaan nilai persediaan dan nilai aset tetap diantaranya nilai tanah. • Sarana dan prasarana yang kurang lengkap. • Karena keterbatasan jumlah sampel dalam melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, besar kemungkinan ada bias dari hasil survey tersebut.	• Peningkatan SDM ASN dalam pengelolaan keuangan daerah • Adanya klinik konsultasi di BPKD dan Inspektorat sebagai tempat konsultasi terhadap permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan OPD, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan peraturan yang ada. • Tim Review Inspektorat mendampingi OPD dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kesalahan dan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai serta dapat membantu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
• Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur pada sebagian unit pelayanan. • Belum adanya standar pelayanan pada sebagian unit kerja • Sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang belum mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.	• Menyusun standar operasional prosedur bagi unit pelayanan yang belum memilikinya. • Menyusun standar pelayanan bagi unit pelayanan yang belum memilikinya. • Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik • Melakukan survei kepuasan masyarakat secara kontinue untuk mengetahui peningkatan kinerja pelayanan yang telah diberikan. • Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan mudah. • Membuat unit pengaduan dan

	pengelola pengaduan yang kompeten • Menetapkan tarif layanan sesuai dengan aturan yang berlaku. • Menetapkan waktu penyelesaian pelayanan. • Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

   Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan; dan
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Maret 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al-Quran (IKU)	$\frac{Jumlah \text{ masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al} - \text{Quran}}{Jumlah \text{ masyarakat usia 13 s/d 15 tahun } seluruhnya} x\ 100\%$	Disdikbud Setda (Kesra), Kecamatan	Disdikbud Setda (Kesra), Kecamatan
2.	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian (IKU)	$\frac{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ Tahun\ sekarang - PDRB\ Sektor\ Pertanian\ \ Tahun\ lalu}{PDRB\ Sektor\ Pertanian\ \ Tahun\ lalu}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani(IKU)	$\frac{Indek\ yang\ diterima\ petani\ (lt)}{Indek\ yang\ dibayar\ petani\ (lb)}\ x\ 100\%$	Dintan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan	Dintan KP, Disnak Keswan dan Dinas Perikanan
4.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (IKU)	Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki	Disdikbud	Disdikbud

5.	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B (IKU)	$\frac{Jumlah\ pendidikan\ dasar\ terakreditasi\ B}{Jumlah\ pendidikan\ dasar\ seluruhnya} x\ 100\%$	Disdikbud	Disdikbud
6.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	Dinas Kesehatan, RSUD	Dinas Kesehatan, RSUD
7.	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	$Jumlah\ Wisatawan\ Tahun\ Sekarang$	Disparpora, DPUPR, Disdagnakerkop UKM, DPMPPTP, Dishub, Dinkes, Dis Kominfo	Disparpora, DPUPR, Disdagnakerkop UKM, DPMPPTP, Dishub, Dinkes, Dis Kominfo
8.	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap (IKU)	$\frac{Panjang\ jalan\ kondisi\ baik}{Panjang\ jalan\ seluruhnya} x\ 100\%$	Dinas PUPR	Dinas PUPR
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Ratio jaringan irigasi (IKU)	$\frac{Panjang\ saluran\ irigasi}{Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian}$	Dinas PUPR	Dinas PUPR
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak (IKU)	$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ bersanitasi\ layak}{Jumlah\ rumah\ tangga\ \ seluruhnya} x\ 100\%$	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP	Dinas PUPR, Dinas LHPKPP
11.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh (IKU)	$Jumlah\ kawasan\ strategis\ dan\ cepat\ tumbuh$	Dinas PUPR, Bapelitbangda	Dinas PUPR, Bapelitbangda
12.	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor (IKU)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	DPMPTP	DPMPTP

13.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan (IKU)	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ dibawah\ garis\ kemiskinan}{Jumlah\ Penduduk\ seluruhnya}\ x\ 100\%$	Dinas Sosial PPA, DPMD, Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes	Dinas Sosial PPA, DPMD, Dinkes, Disdagnakerkop UKM, Dinkes
14.	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka (IKU)	$\frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}\ x\ 100\%$	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD	Disdagnakerkop UKM, DPMPTP, DPMD
15.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita (IKU)	Jumlah pendapatan perkapita dalam rupiah	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distna KP, Dinsnak Keswan	Disdagnakerkop UKM, DPKD, Distna KP, Dinsnak Keswan
16.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Opini Laporan Keuangan (IKU)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat	BPKD, Seluruh Perangkat Daerah, Inspektorat
17.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten (IKU)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah	Setda, Inspektorat, Bapelitbangda, Seluruh Perangkat Daerah
18.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	Nilai LPPD (IKU)	Hasil terhadap laporan LPPD	Setda, Seluruh Perangkat Daerah	Setda, Seluruh Perangkat Daerah
19	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD (IKU)	$\frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi}\ x\ Nilai\ penimbang$	Semua OPD	Semua OPD

20.	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD, Satpol PP Damkar	BPBD, Satpol PP Damkar

BUPATI PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 4784555, Fax. (0751) 4784554 Kode Pos 25584

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI MUKHNI
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 2 Januari 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	70%
2	*Meningkatnya konstribusi sektor primer* terhadap PDRB	*Nilai PDRB Sektor Pertanian*	Rp. 2.492.026,50
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	95,69
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60 tahun
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	43%
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,87 tahun
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	60.000 orang
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	61%
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	46,3
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	78%
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	55
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8,53%
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7,72
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	45,8813 Juta Rp
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	B
		Nilai LPPD	3.25
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	76.61
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari

No	Program	Anggaran	
1	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	495.430.000
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	1.047.962.500
3	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp	2.456.963.500
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp	25.995.000
5	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp	206.370.000
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp	6.403.112.500
7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp	261.115.000
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	91.072.169.226
9	Program Pendidikan Non Formal	Rp	248.300.000
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	137.000.000
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	24.500.000
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	19.250.000
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	181.944.000
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	3.608.244.700
15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	49.972.356.203
16	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	20.000.000
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	167.250.000
18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	47.947.000
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	55.069.000
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	164.489.200
21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	3.498.300.000
22	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp	6.227.082.000

23	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp	4.230.000.000
24	*Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia*	Rp	8.000.000
25	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	51.626.000
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp	9.801.152.000
27	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp	522.616.000
28	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp	3.679.634.000
29	Program pengembangan Kemitraan	Rp	85.400.000
30	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp	91.869.700.000
31	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp	80.930.500.000
32	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	14.709.800.000
33	Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan	Rp	8.742.000.000
34	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	11.090.050.000
35	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp	2.089.300.000
36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	1.650.000.000
37	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	300.000.000
38	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	22.813.500.000
39	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	1.039.165.000
40	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	62.700.000
41	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	631.850.000
42	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	46.400.000
43	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp	187.000.000
44	Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Rp	54.000.000

45	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp	319.401.000
46	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1.115.400.000
47	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	83.100.000
48	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	24.640.000
49	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Rp	119.010.000
50	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp	51.365.000
51	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	17.000.000
52	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	304.140.000
53	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Rp	3.610.000
54	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp	4.549.445.000
55	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	19.200.000
56	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	2.144.000.000
57	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp	2.210.148.000
58	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp	18.150.000
59	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp	110.385.000
60	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp	853.800.000
61	Program penataan struktur industri	Rp	15.200.000
62	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	227.690.000
63	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	387.300.000
64	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	170.050.000
65	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp	375.000.000
66	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp	1.639.760.000

67	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rp	92.750.000
68	*Program pencegahan dini dan penanggulangan korban* bencana alam	Rp	1.809.200.000
69	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Rp	358.500.000
70	Program Perencanan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp	1.572.900.000
	JUMLAH	Rp	439.526.386.829

Parit Malintang, 2 Januari 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Lampiran 3
Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
1	Meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	70%	$\frac{\text{Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun yang bisa baca Al-Quran}}{\text{Jumlah masyarakat usia 13 s/d 15 tahun seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	70%	100	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp 1,356,580,000	Rp 1,354,400,619	99.84	
2	Meningkatnya konstribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 2.492.026,50	$\frac{\text{PDRB Perkapita Tahun sekarang} - \text{PDRB Perkapita Tahun lalu}}{\text{PDRB Perkapita Tahun lalu}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	Rp. 3.731.537,4	149.74	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 1,014,113,168	Rp 987,432,668	97.37	
3	Meningkatkann Kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	95.69	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	95.13	99.41	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 1,014,113,168	Rp 987,432,668	97.37	
								Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp 2,427,613,500	Rp 2,415,459,682	99.50	
								Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp 25,986,500	Rp 25,706,400	98.92	
								Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp 206,070,000	Rp 205,623,500	99.78	
								Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp 6,376,166,500	Rp 6,338,463,740	99.41	
								Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp 259,615,000	Rp 257,915,400	99.35	
4	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60 tahun	Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	13,56 tahun	99.71	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 90,607,493,450	Rp 29,158,075,726	32.18	
								Program Pendidikan Non Formal	Rp 248,300,000	Rp 239,718,497	96.54	
5	Meningkatnya mutu pendidikan	Persentase pendidikan dasar Minimal Terakreditasi B	43%	$\frac{\text{Jumlah pendidikan dasar terakreditasi B}}{\text{Jumlah pendidikan dasar seluruhnya}} \times 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	80.34%	186.84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 167,000,000	Rp 166,034,813	99.42	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 24,500,000	Rp 24,011,800	98.01	
								Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 19,250,000	Rp 19,244,200	99.97	
								Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 154,928,000	Rp 146,611,860	94.63	
6	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,87 tahun	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	$\frac{realisasi}{taget} \times 100$	67,96 tahun	97.27	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 3,558,244,700	Rp 3,478,320,862	97.75	
								Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 4,758,521,300	Rp 1,745,416,702	36.68	
								Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 20,000,000	Rp 18,738,600	93.69	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran			Keterangan
						Realisasi	%					Realisasi	%	
								Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	144,500,000	Rp	143,990,348	99.65	
								Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	48,097,000	Rp	48,078,000	99.96	
								Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	53,819,000	Rp	52,522,000	97.59	
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	152,489,200	Rp	150,337,767	98.59	
								Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	2,362,700,000	Rp	2,213,680,039	93.69	
								Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp	6,222,082,000	Rp	5,767,115,432	92.69	
								Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp	4,712,484,600	Rp	4,659,552,250	98.88	
								Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp	8,000,000	Rp	8,000,000	100.00	
								Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	50,276,000	Rp	50,225,805	99.90	
								Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp	9,801,152,000	Rp	8,818,840,062	89.98	
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisata	60.000 orang	Jumlah wisatawan tahun sekarang	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	183.600 orang	306	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp	509,615,168	Rp	505,568,488	99.21	
								Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp	4,075,634,000	Rp	3,667,065,150	89.98	
								Program pengembangan Kemitraan	Rp	77,800,000	Rp	68,194,500	87.65	
8	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	61%	$\frac{Panjang\ jalan\ kondisi\ baik}{Panjang\ jalan\ seluruhnya} x\ 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	46.98%	77.01	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp	89,388,192,760	Rp	70,519,118,233	78.89	
								Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp	81,730,500,000	Rp	77,525,431,163	94.85	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%				Realisasi	%	
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Rasio jaringan irigasi	46,3	$\frac{Panjang\ saluran\ irigasi}{Luas\ lahan\ budidaya\ pertanian}$	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	47.12	101.77	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	16,571,449,500	Rp 12,203,256,002	73.64	
10	Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	78%	$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ bersanitasi\ layak}{Jumlah\ rumah\ tangga\ seluruhnya} x\ 100\%$	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	75%	96.15	Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan	Rp	8,102,000,000	Rp 7,996,241,009	98.69	
								Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	10,545,340,600	Rp 8,877,820,309	84.19	
								Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	1,555,108,800	Rp 1,553,691,033	99.91	
								Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	300,000,000	Rp 146,146,000	48.72	
11	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan startegis dan cepat tumbuh	8	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	7	87.5	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	24,024,727,900	Rp 17,297,504,100	72.00	
								Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	1,090,265,000	Rp 893,778,291	81.98	
								Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp	52,700,000	Rp 51,104,900	96.97	
12	Meningkatnya jumlah investor	Jumlah investor	55	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	69	125.45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	464,850,000	Rp 460,937,288	99.16	
								Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	53,600,000	Rp 53,475,500	99.77	
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Rp	187,800,000	Rp 186,413,650	99.26	
								Program Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Rp	61,001,000	Rp 60,989,000	99.98	
13	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	8.53%	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ dibawah\ garis\ kemiskinan}{Jumlah\ Penduduk\ seluruhnya} x\ 100\%$	$\frac{(2\ x\ target) - realisasi}{taget} x\ 100$	8.04%	105.74	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	319,401,000	Rp 319,106,650	99.91	
								Program Pengembangan Perumahan	Rp	1,115,400,000	Rp 1,113,450,750	99.83	
14	Menurunnya Tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7.72	$\frac{Jumlah\ pengangguran}{Jumlah\ angkatan\ kerja} x\ 100\%$	$\frac{(2\ x\ target) - realisasi}{taget} x\ 100$	6.90	110.62	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	81,887,000	Rp 81,881,850	99.99	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%				Realisasi	%	
								Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 23,065,000		Rp 22,996,200	99.70	
15	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	45,8813 Juta Rp	Jumlah pendapatan perkapita dalam rupiah	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	46,73 Juta Rp	101.85	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Rp 119,010,000		Rp 116,731,400	98.09	
								Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 42,982,000		Rp 41,898,200	97.48	
								Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 17,000,000		Rp 16,917,500	99.51	
								Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 282,160,000		Rp 278,834,856	98.82	
								Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp 4,505,629,000		Rp 4,410,592,800	97.89	
								Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 19,200,000		Rp 19,190,000	99.95	
								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2,872,806,692		Rp 2,745,412,921	95.57	
								Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp 2,068,848,000		Rp 2,066,512,700	99.89	
								Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp 18,150,000		Rp 17,979,500	99.06	
								Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp 130,120,000		Rp 128,987,550	99.13	
								Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp 895,800,000		Rp 854,298,869	95.37	
								Program penataan struktur industri	Rp 15,200,000		Rp 15,199,300	100.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%				Realisasi	%	
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	WTP	100	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 45,300,000		Rp 45,298,000	100.00	
		Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	B	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	B	100	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 335,320,000		Rp 329,983,038	98.41	
		Nilai LPPD	3.25	Hasil terhadap laporan LPPD	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	3.12	96	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 162,623,875		Rp 160,371,197	98.61	
17	Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan OPD	76.61	$\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} x\ Nilai\ perimbang$	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	76.20	99.46	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 375,600,000		Rp 369,371,047	98.34	
18	Meningkatnya masyarakat tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	2 nagari	Jumlah nagari tangguh bencana	$\frac{realisasi}{taget} x\ 100$	2 nagari	100	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 2,182,656,500		Rp 2,134,183,850	97.78	
								Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rp 129,250,000		Rp 129,024,860	99.83	
								Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp 1,939,885,917		Rp 1,873,455,759	96.58	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Rp 338,990,000		Rp 338,180,718	99.76	
								Program Perencanan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp 3,264,349,563		Rp 3,264,349,563	100.00	